PENGGUNAAN SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH PASCA BENCANA

(Library Research)

SKRIPSI

Oleh :

ZUHRA NADILLA POHAN

NIM : G74215119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya :

Nama : Zuhra Nadilla Pohan

NIM : G74215119

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penggunaan Sukuk Untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana

Dengan ini Sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F9BA2AHF215093151
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zuhra Nadilla Pohan

NIM G74215119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zuhra Nadilla Pohan NIM. G74215119 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 November 2019

Pembimbing,

Achmad Room Fitrianto,S.E, M.EI
NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zuhra Nadilla Pohan NIM. G74215119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at 13 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Achmad Room Fitrianto, M.EI
NIP.197706272003121002

Penguji II

Andriani Samsuri,S.Sos,MM
NIP.197608022009122002

Penguji III

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP.201603311

Penguji IV

Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI
NIP.199103162019031013

Surabaya, 13 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah.Ali Arifin, M. M
196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zuhra Nadilla Pohan
NIM	: G74215119
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address	: zuhranadillap@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penggunaan Sukuk Untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2020

Penulis

Zuhra Nadilla Pohan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penggunaan Sukuk untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana." Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana sukuk dapat membantu dalam pemulihan pada daerah pasca bencana.

Indonesia adalah negara yang rentan terjadi bencana salah satu yang paling bahaya gempa dan tsunami. Akibat dari bencana tersebut berdampak pada pembangunan atau infrastruktur. Sehingga, pemerintah melakukan pembangunan kembali pada daerah yang terkena bencana yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dana yang dibutuhkan dari kerugian dan kerusakan akibat bencana gempa pada daerah Jogja-Jawa Tengah, Sumatera Barat-Bengkulu melalui instrumen sukuk sebagai solusi untuk pembangunan pada daerah terkena bencana. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi literatur berupa Sukuk Istishna'-Ijarah untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur baik bukuk,jurnal,artikel dan media literasi lainnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sukuk Istishna'-Ijarah untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana dapat mengcover keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan kembali daerah Jogja-Jawa Tengah, Sumatera Barat-Bengkulu dengan terhimpun dana sebesar Rp 4 Triliun dengan jangka waktu 5 tahun dan asumsi kupon nilai pasar tertinggi 8% yang dibiayai hanya sektor milik pemerintah yang bisa menghasilkan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Sukuk Istishna'-Ijarah bisa menjadi salah satu solusi untuk pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan kembali untuk daerah terkena bencana yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan bisa mengurangi hutang luar negeri dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Kata Kunci : Sukuk, Pembiayaan, Pemulihan Bencana Alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 25
BAB II SUKUK DAN PEMULIHAN BENCANA ALAM 27
A. Obligasi Syariah 28
B. Sukuk Sebagai Pembiayaan Sosial 42
C. Pemulihan Bencana Alam 50
BAB III PEMULIHAN BENCANA DI INDONESIA 54
A. Bencana Alam Di Indonesia 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV MODEL DAN POTENSI SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN DAN PASCA BENCANA DI INDONESIA 75

A. Model Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam ... 76

B. Simulasi Pembiayaan Sukuk Istishsna'-Ijarah Pada Pemulihan Bencana Alam 80

C. Potensi Sukuk Istishna'-Ijarah Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam 89

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN..... 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur 37

Tabel 3.1 Perbandingan Bencana-bencana Internasional..... 60

Tabel 3.2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng 63

Tabel 3.3 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Bengkulu-Sumbar.. 67

Tabel 3.4 Total Jumlah Kerusakan dan kerugian dari Kepemilikan Pemerintah Dan Swasta..... 69

Tabel 3.5 Total Jumlah Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat 71

Tabel 4.1 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng 81

Tabel 4.2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Bengkulu-Sumbar.. 85

Tabel 4.3 Total Jumlah Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia..... 4

Gambar 2.1 Klasifikasi Instrumen Pembiayaan APBN..... 31

Gambar 3.1 Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia..... 57

Gambar 3.2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng..... 62

Gambar 4.1 Model Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana..... 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari 9 sub bab. Pertama menjelaskan latar belakang masalah, dalam sub bab ini menggambarkan alasan peneliti tertarik untuk meneliti topik yang akan diteliti. Sub bab kedua meliputi identifikasi masalah dan batasan masalah yang menjelaskan kemungkinan permasalahan yang muncul dalam penelitian melalui identifikasi masalah. Agar permasalahan yang diidentifikasi tidak keluar dari topik peneliti maka diperlukan pembatasan masalah.

Sub bab ketiga merupakan rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Sub bab keempat berisi kajian pustaka yang memuat tentang persamaan dan perbedaan dengan kajian terdahulu dengan kajian sekarang dengan tujuan agar tidak terjadi plagiasi dari penelitian yang sudah ada. Sub bab kelima berisi tujuan penelitian yaitu apa yang akan dicapai peneliti dalam penelitian tersebut.

Sub bab keenam dalam penelitian ini berisi tentang kegunaan hasil penelitian meliputi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Sub bab ketujuh berisi tentang definisi operasional yang memuat tentang penjelasan dari variabel penelitian secara operasional. Sub bab kedelapan berisi tentang metode penlitian yang digunakan penliti dalam menggali dan menganalisa berdasarkan data yang ditemukan. Sub bab kesembilan berisi sistematika pembahasan dari keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Indonesia terletak di daerah“cincinapi”pasifik yangmembuatwilayah Indonesia rentanterjadibencana seperti, gempa,banjir,longsor. Terutama yang paling bahaya adalah bencana gempa dan tsunami. Sekitar 80% gempa bumi terjadi disekitar cincin api dimana 5-6% gempa bumi biasa dan 17 % gempa bumi besar yang terdapat di pulau Jawa dan pulau Sumatera.[1]

Pada Tahun 2004 Gempa yang menyebabkan tsunami telah menghancurkan seluruh Provinsi Nanggroe Aceh dan menelan banyak korban. Selang 3 tahun kemudian di tahun 2006 terjadi gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. walaupun tidak berpotensi tsunami tetapi kekuataan gempa yang terjadi di kedua Provinsi ini sangat kuat dan menghancurkan bangunan.walaupun tidak berpotensi tsunami tetapi kekuataan gempa yang terjadi di kedua Provinsi ini sangat kuat dan menghancurkan bangunan.

Pada Tahun 2018 gempa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu dan Kabupaten Donggala akibat gempa yang sangat besar tersebut mengakibatkan tsunami sama persis seperti terjadi di Aceh

[1]Wikipedia,*“Cincin Api Pasifik”*, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/cincin_api_pasifikdiakses 19 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2006. Setelah terjadi Sulawesi gempa bumi juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut BMKG, Wilayah Indonesia itu sangat berpotensi gempa bumi karena posisi yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik. Dimana dari tumpukan terimplikasi adanya sekitar enam tumpukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa kuat. Indonesia juga banyak sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah tergambar dengan baik dan ada yang belum tergambarkan. Maka, dari itu tidak heran kalau gempa di wilayah indonesia itu dalam sehari bisa lebih 10 gempa yang terjadi.

Kurun waktu 10 tahun terakhir,setiap tahunnya hampir 2000 kejadian bencana alam di Indonesia terjadi. Sebagian besar bencana yang terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Tak hanya itu, *major disaster* seperti tsunami dan gempa bumi juga melanda Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seperti gempa bumi dan tsunami di Lombok dan Donggala yang menewaskan ribuan orang.

Pada gambar 1.1 juga menjelaskan bahwa bencana alam yang berdampak merugikan negara adalah banjir. Salah satu daerah yang paling sering atau berlangganan banjir adalah Ibu kota Jakarta. Pada presentase atau grafik pada gambar sekitar 10 tahun terakhir tepatnya tahun 2018 yang paling tinggi terjadi banjir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1

Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia

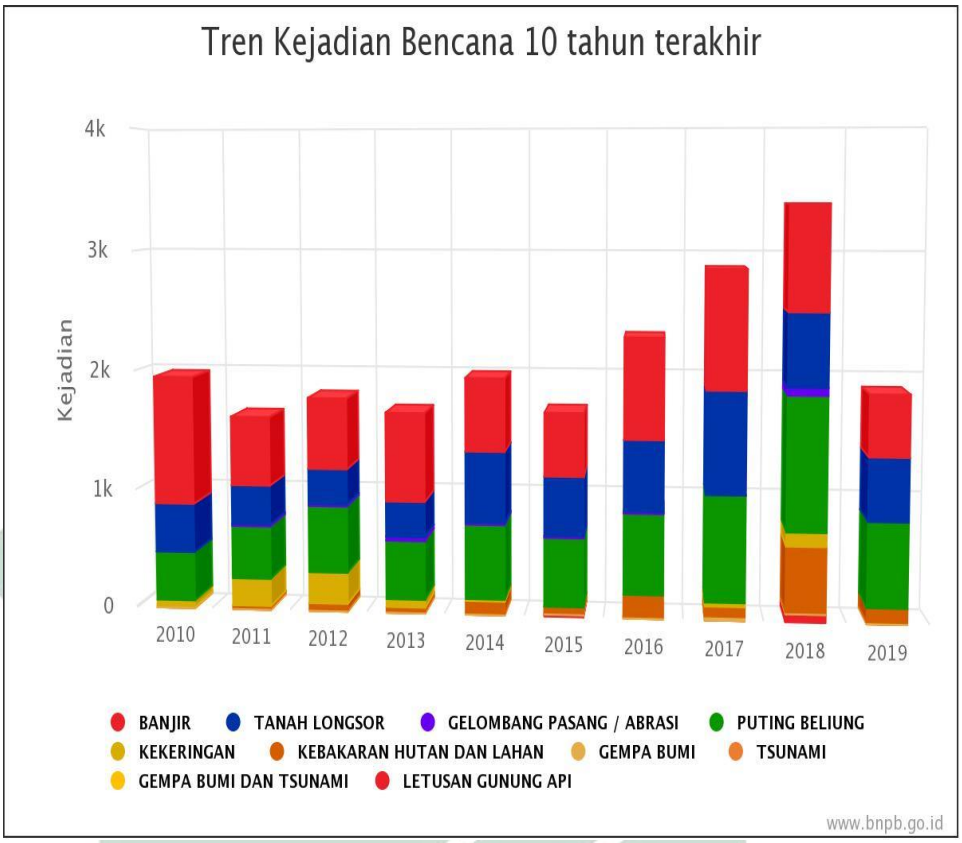

Sumber: bnpb.go.id

Gempa yang terjadi di wilayah indonesia berdampak pada pembangunan atau infrastruktur yang terjadi di daerah yang terkena bencana gempa bumi. Pemerintah indonesia mengupayakan akses mulai dari pengerahan sumber daya manusia, peralatan,logistik,dan anggaran.

Gempa terparah terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2006. Dimana penyebab gempa yang terjadi di dua provinsi. Karena adanya pergeseran sesar opak yang membentang dari pesisir pantai bantul sampai ke prambanan sepanjang 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

km. Gempa tersebut mempunyai daya rusak yang cukup kuat karena beberapa faktor, yaitu kekuatan gempa,jenis gempa dan kondisi tanah yang dilewati gempa. Kekuatan gempadi atas 5 SR sehingga termasuk gempa yang berskala kuat. Gempa ini juga tergolong “perusak” karena termasuk gempa yang dangkal, yaitu hanya berkedalaman 17 kmdibawah permukaan tanah. Padahal gempa yang aman yaitu gempa yang berkedalaman 30 km dibawa permukaan tanah. Kondisi tanah di daerah Yogyakarta dan sekitarnya merupakan endapan vulkanik yang rapuh sehingga gempa di yogyakarta ini mengakibatkan banyak kerusakan.

Gempa yang terjadi di Aceh, Yogyakarta dan Palu diumumkan sebagai bencana nasional. Pemerintah Indonesia langsung melakukan penanganan cepat. Presiden RI memerintahkan TNI untuk menanganin gempa tersebut. Beberapa negara internasional juga menyatakan berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Negara yang berkomitmen untuk memberikan bantuan adalah Jepang,Inggris,Malaysia,Singapura,Perancis, PBB(UNICEF).

Bencana sendiri Bukan yang terjadi akibat alam saja tapi juga akibat perbuatan manusia yang mengakibatkan kerugian bencana yang terjadi seperti bencana longsor,banjir bandang. Sebagaimana telah di jelaskan dalam al-Qur’an surah ar-Rum (30) ayat 41-42:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ظَهَرَ الفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَ البَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ ى النَّا سِ لِيُذِ يْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِ يْ عَمِلُوْ الَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُ وْافِى الْاَرْضِ فَانْظُرُ وْا كَيْفَ كَانَ عَا قِبَةُ الَّذِ يْنَ مِنْ قَبْلُ ۗكَانَ اَكْثَرُ هُمْ مُّشْرِ كِيْنَ ﴿٤٢﴾

Artinya :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia,Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Bepergianlah di muka bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah).ar-Rum: (30) ayat 41-42.

Maka dari itu pemerintah melakukan pembangunan kembali terhadap daerah yang terkena bencana gempa tsunami, gempa, banjir dan juga longsor. Pada pemulihan pembangunan daerah yang terkena bencana dibutuhkan dana yang banyak. Dari Segi dana pemerintah kekurangan dana untuk membangun kembali infrastruktur yang terjadi akibat bencana gempa dan tsunami tersebut.

Pada pembangunan kembali membutuhkan dana senilai Rp 70 Triliun. Gempa yang terjadi di aceh membutuhkan dana Rp 42,7 Triliun untuk pemulihan pembangunan infrastruktur pasca tsunami aceh.[2] Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali akibat gempa yang terjadi

[2]Tempo.co, *"Total kerugian Aceh dan Sumut sekitar Rp 42,7 Triliun"*, dalam: https://nasional.tempo.co/read/55201/total-kerugian-aceh-dan-sumut-sekitar-rp-427-triliun diakses pada 20 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di palu dan donggala senilai Rp18,4 Triliun.[3] Sedangkan dana yang dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp 8,8 Triliun.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi tujuan menciptakan sistem penanggulangan bencana. Indonesia menerapkan tiga sistem penanggulangan yaitu lembaga,legislasi dan pendanaan. Pada Peraturan Presiden Nomer 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur penanggulangan bencana secara teratur dan menyeluruh ini untuk bagian kelembagaan. Sedangkan pada pendanaan atau sumber pendanaan sendiri dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Baik melalui APBD dan APBN, dana tersebut bisa dana siap pakai, dana bantuan sosial juga bersumber dari masyarakat maupun dari dana dari komunitas internasional.[5]

APBN dirasakan dapat membantu hanya pada jangka pendek ketika terjadi bencana alam, yang mana pemerintah membutuhkan dana banyak untuk pembangunan kembali ekonomi disuatu daerah dimana pembanguna yang seperti pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, lembaga pada wilayah pasca bencana pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

---

[3]Tim CNN Indonesia, "*BNPB: Kerugian akibat gempa palu capai Rp18,4 Triliun"*, dalam: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181028193229-20-342094/bnpb-kerugian-akibat-gempa-palu-capai-rp184-triliun di akses pada 21 maret 2019.

[4]Krisdiantoro, *"Kerugian akibat gempa lombok Rp8,8 Triliun, 125 ribu lebih rumah rusak"*, dalam: http://jabar.tribunnews.com/2018/08/27/kerugian-akibat-gempa-lombok-rp-88-triliun-125-ribu-lebih-rumah-rusak di akses pada 21 maret 2019.

[5] Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 24 tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

APBN yang direncana untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu, terbatas pada satu tahun. ada beberapa negara mencoba mengembangkan pendanaan jangka menengah, tetapi skema ini biasanaya bukan sebagai patokan utama konsep pada penanganan risiko bencana alam. Jangka waktu alokasi untuk pembangunan infrastruktur 3-5 tahun kedepan, untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan.

Menurut perhitungan yang dijabarkan oleh BNPB bahwa dana darurat bencana yang pas senilai Rp 15 Triliun per tahun mengingat negara Indonesia sendiri rentan terkena bencana. Dana yang diberikan pada tahun 2018 hanya Rp6,3 Triliun.[6] Dana yang diberikan tersebut menyulitkan bagi BNPB untuk melakukan kegiatan seperti rehabilitasi,dan rekonstruksi dan kegiatan tanggapan darurat lainnya pada pasca bencana, dengan keterbatasan dana juga bisa berdampak tahapan kesiapan dalam menghadapi bencana.

Salah satunya adalah pemerintah berkonsentrasi dalam memitigasi upaya fisik yaitu merelokasi infrastruktur publik. Ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur publik.

Selama ini dalam menghadapi bencana alam, partisipasi masyarakat masih sedikit per kasus bencana alam melalui lembaga sosial. Pendanaan pada bencana seharusnya lebih tanggap. Dilihat dari berbagai

[6] M. Ahsan Ridhoi, "Komisi VIII: BNPB Punya Dana Rp 6,5 T untuk Penanggulangan Bencana", dalam https://tirto.id/c396 diakses pada 30 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabel bencana yang dilihat dari berbagai aspek seperti media sampai lembaga kemanusiaan setelah bencana terjadi. Maka, diperlukan satu instrumen pendanaan baru yang mencover untuk pembangunan pasca bencana. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan pembiayaan altermatif dalam proses mitigasi.

Pada saat ini sukuk di Indonesia sedang mengalami peningkatan perkembangan sangat dinamis. Kementerian Keuangan yang giat untuk mempromosikan agar masyarakat berinvestasi untuk memajukan pembangunan nasional. Salah satu produknya adalah pengembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara sendiri terbagi dua Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi. Sedangkan Sukuk Negara juga dua bagian yaitu Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan. Dipilih antara dua bagian tersebut adalah Sukuk Ritel Karena sukuk ritel dapat mendorong dan menfasilitasi mobilisasi dana masyarakat dalam rangka pembiayaan APBN, yang secara bertahap bisa membantu dalam pembiayaan pembangunan. Sukuk ritel yang paling sukses dan berhasil memperoleh animo yang besar dari masyarakat yang mana penawaran pembelian yang masuk dari tiap tahun cukup tinggi.

Pada Tahun 2015 yaitu sekitar 4 tahun terakhir, Pemerintah telah meelakukan tujuh kali penerbitan Sukuk Ritel yaitu mnecapai Rp90,8 Triliun. Salah satu sasaran penggunaan dana beserta imbal hasil SBSN seperti di beritakan Republika pada 4 Oktober 2018, adalah untuk dana sosial pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana sperti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di Lombok dan Palu. Dari dana investasi sukuk tersebut digunakan untuk pembangunan aset pemerintah di daerah terkena bencana.

Menurut yang di sampaikan oleh World Bank tentang strategi pembiayaan penanggulangan risiko bencana untuk Indonesia, untuk bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, strategi instrumen pembiayaan yang dirancangkan adalah obligasi bencana alam. Tetapi instrumen tersebut sampai pada saat ini belum diterapkan di Indonesia. dengan adanya sukuk sebagai obligasi syariah yang legal di Indonesia, tentunya bisa membantu pembiayaan ini.

Pontesi sukuk di Indonesia yang ber investasi senilai mencapai Rp 21 Triliun tentu harus dimaksimalkan. Dana sukuk tersebut harus dikelola dengan baik agar bisa membantu pembangunan nasional di Indonesia. Munculnya instrumen baru Sukuk *Istishna'-Ijarah* ini memberikan keringanan untuk negara untuk pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya memberikan solusi pembiayaan alternatif salah satunya sukuk dalam hal proses mitigasi bencana. Dengan melakukan penelitian pemodeln alternatif pembiayaan pasca bencana penulis mengambil judul **"Penggunaan Sukuk *Istishna-Ijarah* untuk Pembangunan Pasca Bencana di Indonesia".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi masalah dan batasannya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Indonesia merupakan Negara yang rentan bencana alam.
   b. Dampak fisik dan ekonomi dari bencana alam di Indonesia yang relatif besar.
   c. Terbatasnya dana penanggulangan bencana alam di APBN.
   d. Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih sedikit.
   e. Belum adanya instrumen pembiayaan pasca bencana dengan finansial Islam di Indonesia.
   f. Potensi sukuk yang sangat besar di Indonesia namun belum direalisasi dengan maksimal.

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang di atas,maka dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini terfokus. Penelitian ini lebih difokuskan pada peran dan prospek Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan recovery pasca bencana alam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah di jelaskan di atas peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana Pemodelan Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam di Indonesia?
2. Bagimana simulasi penerapan Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam Gempa Jogja dan Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bengkulu?
3. Bagaimana potensi dan prospek Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi referensi serta pembanding dengan penelitian saat ini.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Novia Khairunnisa dari UIN Aceh pada tahun 2018 tentang "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)".[7]Penelitian yang dilakukan oleh Novia Khairunnisa bertujuan untuk menganalisa tentang Pertama, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam melaksanakan komitmen

[7] Novia Khairunnisa, "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)",Skripsi-UIN Aceh,2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorongkerjasama dibidang infrastrukur. Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah menggunakan obligasi syariah atau yang biasa dikenal dengan sukuk. Kedua, peran sukuk negara sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dimana sukuk mengalami peningkatan. Dimana pembangunan atau pembiayaan proyek infrastruktur sudah di atur oleh peraturan pemerintah nomer 56 tahun 2011.Ketiga, dana yang dibutuhkan oleh indonesia khususnya aceh untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang ada di aceh semakin meningkat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang di teliti. Sedangkan persamaandari kedua penelitian tersebut sama-sama menganalisis tentang sukuk hanya saja pada penelitian saat ini lebih spesifikasi pada dana.

2. Penelitian yang ditulis oleh Reva Arbano dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada tahun 2009 tentang "Penerbitan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Negara".[8] Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui analisis SWOT penerbitan SBSN serta untuk mengetahui alternatif strategi penerbitan SBSN sebagai alternatif pembiayaan negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan penelitian lapangan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan perdana SBSN di Indonesia

[8] Reva Arbano, "Penerbitan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Negara", Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad ijarah yang metode penerbitannya dengan cara bookbuilding. Dari analisis SWOT yang dilakukan. SBSN memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam membiayai pembangunan negara.

3. Penelitian yang ditulis oleh Diyanti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 tentang "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN".[9] Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana sukuk di Indonesia telah sesuai dengan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dan penelitian lapangan (fieldresearch). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dana sukuk di Indonesia di gunakan untuk membiayai defisit pada APBN, yang penggunaan dananya bersifat umum. Negara sebisa mungkin menghindari defisit dalam mengelola keuangan publik karena dalam keuangan publik Islam belanja negara di sesuaikan dengan pemasukan.
4. Penelitian yang ditulis oleh Andi Tenri dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 tentang "Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara".[10] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi Sukuk Negara Ritel, besarnya tingkat imbalan Sukuk Negara Ritel, dan perbandingan tingkat imbalan Sukuk Negara Ritel dengan instrumen investasi lainnya. Metode yang

[9]Diyanti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN", Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010.

[10] Andi Tenri, "Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara", Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar,2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi Sukuk Negara Ritel telah terstruktur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008. Sukuk Negara Ritel mempunyai tingkat imbalan yang lebih tinggi dari instrumen investasi lainnya. Selain tingkat imbalan yang lebih baik dari instrumen investasi lainnya, Sukuk Negara Ritel juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Investasi Sukuk Negara Ritel juga dijamin seluruhnya oleh pemerintah, dan akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo.

5. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Helmi dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015 tentang "Komparasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah dengan dana obligasi konvensional dan obligasi syariah/sukuk (studi kasus pembangunan jalan tol trans sumatera)".[11] Dalam penelitian ini untuk membangun konsep alternatif pembiayaan infrastruktur dengan sistem keuangan syariah dengan konvensional dan obligasi syariah/ sukuk penelitian menggunakan metodologi kualitatif. Dilakukan dengan proses diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi serta uji hipotesis.

[11] Achmad Helmi, "Komparasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah dengan dana obligasi konvensional dan obligasi syariah/sukuk (studi kasus pembangunan jalan tol trans sumatera)", Skripsi-UIN Sunan Kalijaga,2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak di capi sebagai berikut :

1. Untuk mensimulasikan model Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis simulasi penerapan *Sukuk Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis potensi dan prospek Sukuk *Istishna'-Ijarah* sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam di Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

   Untuk menambah wawasan dan menyempurkan pengetahuan keilmuan bagi peneliti mengenai manfaat dan peran Sukuk sebagai salah satu instrument pembiayaan dalam Islam, terutama untuk pola pembiayaan recovery bencana alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi ini.

2. Aspek Praktis

   a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai fungsi dan pemanfaatan sukuk serta menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya berinvestasi sukuk yang berguna untuk pembangunan nasional di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi pemerintah, penelitian ini berguna untuk memberikan suatu masukan atau wawasan serta evaluasi secara mendalam mengenai peran Sukuk Istishna'-Ijarah terhadap pembiayaan recovery pasca bencana alam. Besar kecilnya peran yang diberikan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kontribusi yang lebih tinggi.

c. Diharapkan skema atau model yang telah peneliti dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pasca bencana oleh pihak yang terkait seperti Kementerian Keuangan,Bank Indonesia,maupun BNPB.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah hal-hal yang mengungkapkan makna dari konsep atau ide agar bisa diukur, dengan menilik indikator dari satu konsep.[12] Agar mudahdalam memahami maka penulis mendefinisikan beberapa istilah terkait pembahasan dalam skripsi ini:

1. *Sukuk Istishna'-Ijarah* merupakan surat utang syariah yang berakad Jual beli kombinasi sewa atau biasa di sebut Sukuk Istishna'-Ijarah yang mana dari instrumen ini dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman dan bebas risiko default, yaitu sukuk negara. sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks proyek sosial khususnya dalam bidang pendidikan,kesehatan, dan pembangunan.

   Skema dari Sukuk Istishna-Ijarah sendiri yaitu ketika pemerintah mendapatkan dana melalui Sukuk Istishna'-Ijarah dan Istishna sendiri

[12] Noor Juliansyah, "*Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pembelian barang diawal dengan margin atau imbal hasil dibayar di belakang dan agar pemerintah berhak untuk mengelola pembangunan proyek maka pemerintah sewa untuk membayar margin tersebut.

2. Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam, pembiayaan untuk pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, pendidikan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Pada proses pemulihan pembangunan yang di adakan oleh lembaga melalui kerjasama yang diatur oleh BNPB untuk tingkat pusat dan pemeroses pemulihan pada tingkat daerah di koordinasikan oleh kepala BPBD.

   Pengerjaan yang dilakukan untuk mendukung proses pembangunan kembali yang berada di bawah koordinator dari BNPB atau BPBD dapat memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan data dari proses rancangan pembangunan. Untuk merencanakan proses rekonstruksi, perlu adanya pertimbangan pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN. Pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBD. Apabila dana yang berasal dari APBD tidak terpenuhi, pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dapat menggunakan dana bantuan sosial yang disediakan oleh APBN.[13]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks[14], yang berguna untuk mencari jawaban dari rumusan masalah.\ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi pada data-data kepustakaan yang di himpun oleh peneliti.

1. Teknik Pengumpulan Informasi

a. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka (literatur review) merupakan deskripsi tentang literatur atau referensi yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.[15] Penulis menggunakan kajian pustaka karena dalam kajian pustaka referensi yang diambil berdasarkan data-data yang relevan yang dapat dipergunakan di kemudian hari, baik untuk di uji maupun sebagai kajian teori. Selain itu penggunaan kajian pustaka sebagai bahan penelitian dapat mengefisensi waktu dan biaya.

Adapun kajian pustaka yang penulis gunakan berupa buku dan e-book yaitu:

---

[13] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

[14]Luluk Fikri Zuhriyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Revka Putra Media, 2012), cet 1, 28.

[15] Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Prenadamedia Group,2013), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengembangan Aspek Syariah Sukuk Negara.
2) Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah.
3) Investasi pada Pasar Modal Syariah.
4) Sukuk ; memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah.
5) Investasi Produk Keuangan Syariah.
6) Pilih Mudharabah atau Ijarah.
7) Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah.
8) Pemerintah RI UU No.24 tahun 2009 tentang penanggulangan Bencana.
9) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008.
10) Peraturan RI UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
11) Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Surat Hutang Berharga.
12) Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Adapun kajian pustaka yang berupa jurnal dan e-jurnal yaitu:

1) Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, karya Dede Abdul Fatah.[16]

[16] Dede Abdul Fatah. "Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan". Al-Adalah. Vol.X. No.1, Januari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Provinding Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Valcano, karya Achmad Room Fitrianto.[17]
3) Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional karya Heri Sudarsono.[18]
4) Lessons from the Efforts to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia, karya Bank Dunia.[19]
5) Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration, karya Bank Dunia.[20]
6) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur karya Hariyanto Eri. [21]
7) Laporan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat karya bappenas.[22]

---

[17] Achmad Room Fitrianto. "Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Provinding Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Valcano". Presented on Annual International Coference on Islamic Studies (AICIS XII). Proceeding Coference . 2010.

[18] Heri Sudarsono. "Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional". Aplikasi Bisnis D3 FE UII. Vol.7. No.12. Januari 2018.

[19] Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank. "Lessons from the Efforts to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia", Technical Note, 2010.

[20]Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank. "Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration".Publication, Oktober 2011.

[21] Hariyanto Eri. "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur." http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807.

[22] Bappenas. "Laporan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat." Publikasi Oktober 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Laporan Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah karya Bappenas.[23]

2. Content Analysis sebagai Alat Observasi

Pada penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah Analisis isi. Menurut Weber analisis isi merupakan metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat infrensi yang valid dari teks[24] Barelson dalam Yusuf menambahkan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk mendapatkan gambaran objektif, sistematis dan kualitatif mengenai isi komunikasi, walaupun masih tetap dimungkinkan *counting* dalam penyajian data.[25]

1) Adapun Jenis analisis isi (content analysis) yang mana penulis menggunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan pendekatan deskriptif. Analisis konten yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan pola-pola baru yang muncul, termasuk mencermati kategori yang mungkin diabaikan oleh partisipan sendiri.[26] Adapun keuntungan dari analisis isi yaitu: 1)melihat secara langsung melalui komunikasi teks atau manuskrip, 2) menyediakan nilai historis kultural, 3) tidak langsung dalam menganalisis interaksi, 4) model berpikir kompleks,

---

[23] Bappenas. "Laporan Laporan Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah." Publikasi Juli 2016.

[24] Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015), 15.

[25] Muri Yusuf, *"Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan"*. (Jakarta: Kencana, 2017), 441-442.

[26] Christine Daymon dan Immy Holloway, *"Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications"*, Pen. Cahya Wiratama (Yogyakarta: Bentang, 2008), 384-385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 5) memadukan metode kualitatif dan kuantitatif (mixing method). Sedangkan kelemahan dari analisis isi adalah kecenderungan menyederhanakan dengan menghitung dan mencari relasi antar kata.[27]

Menurut Eriyanto, terdapat lima tujuan mengapa analisis isi digunakan dalam penelitian yaitu:[28]

1. Menggambarkan karakteristik pesan.
2. Melihat pesan pada situasi yang berbeda.
3. Melihat pesan pada khalayak yang berbeda.
4. Melihat pesan dari komunikator yang berbeda.
5. Menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan.

Adapun tahapan-tahapan penelitian menggunakan metode analisis isi sebagai berikut:[29]

1) Merumuskan pertanyaan penelitian

Dalam merumuskan pertanyaann yang tepat tentang topik yang diteliti, peneliti perlu memberi batasn agar segala tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

2) Membuat Target Observasi

Dalam membuat target observasi peneliti perlu memilih objek penelitian yang sesuai dengan unit analisis yang digunakan.

---

[27] Muri Yusuf, Metode Penelitian..., 443.

[28] Eriyanto, 32-42.

[29] Marilyn Domas White dan Emily E. Marsh, *"Content Analysis: A flexible Methodology"* Library Trends, Vol. 55, No. 1, summer 2006 ("Research Methods," Edited By Lynda M.B.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika objek yang digunakan adalah data verbal maka perlu disebutkan tempat, tanggal, dan alat komunikasi yang digunakan. Namun, jika objek berupa pesan-pesan maka perlu diindentifikasi terlebih dahulu.

3) Melakukan pengkodean (coding)

Pengkodean dilakukan untuk mencatat istilah-istilah dalam komunikasi. Setelah dilakukan pencatatan maka dilakukan klasifikasi untuk mengetahui sejauh mana makna yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4) Melakukan Analisis

Setelah dilakukan pengkodean dan klasifikasi maka peneliti melakukan analisis untuk mencari makna yang terkandung agar dapat ditemukan arto dan tujuan dari isi komunikasi. Hasil analisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penstrukturan pembahasan dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini untuk digunakan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penlitian ini terdapat lima bab.

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,rumusan masalah,kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian yaitu tentang sukuk, jenis akad pada sukuk, sukuk sebagai pembiayaan sosial dan teori pemulihan bencana alam.

Bab Ketiga merupakan penyajian data berisi tentang data penelitian memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif. Bab ini berisi tentang gambaran pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia khususnya gambaran bencana Jogja,Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama mengenai pemodelan Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana di Indonesia. Kedua, simulasi penerapan Sukuk Istishna'-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijarah sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam Gempa di Jogja,Jawa Tengah,Sumatera Barat dan Bengkulu. Dan ketiga, menganalisa potensi dan prospek Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai pembiayaan pembangunan bencana alam di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bahasan pokok-pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
SUKUK DAN PEMULIHAN BENCANA ALAM

Pada saat ini, pemerintah sedang giat melakukan pembangunan berkelanjutan yaitu pada pembangunan infrastruktur yang mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi.untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut di butuhkan dana yang besar. Produk Investasi yang pada zaman sekaraang semakin banyak di minati oleh masyarakat yang menjadi solusi untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini akan mengupas produk investasi yang bisa digunakan untuk membangun kerangka analisis. Lebih lanjut, skripsi ini juga akan mengkaji pembahasan tentang sukuk. kajian teori yang dimunculkan pada bab ini sebagai kerangka analisis dari temuan teori untuk menentukan yang pas untuk di gunakanpembiayaan pembangunan kembali pasca bencana di Indonesia.

Bab II meliputi 3(Tiga) sub bab yaitu sub bab pertama yaitu satu definisi sukuk menurut dsn dan menurut ahli. Kedua,yaitu landasan sukuk yang menjadi pedoman. Ketiga, yaitu akad pada sukuk atau jenis-jenis sukuk. sub bab kedua yaitu sukuk sebagai pembiayaan sosial. Sub bab ketiga, pemulihan bencana alam yang sebagai patokan untuk tahap-tahap dilakukan pembangunan kembali pada daerah yang terkena bencana sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi sendiri merupakan dari bahasa Belanda yang artinya obligate, yang selanjutnya di terjemahkan kedalam bahasa Indoensia yaitu obligasi atau kontrak. Berdasarkan pada Pasal 1 keputusan RI No.755/KMK011/1982 menjelaskan obligasi sendiri ialah surat berharga yang berdampak pada pinjam meminjam uang dari masyarakat dalam bentuk dan ukuran waktu tertentu. Penanam modal bersedia untuk membayar imbalan bunga yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Pada umumnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat utang atau cek yang mana artinya shukuk dan jamak yang artinya dokumen atau piagam. Sukuk atau obligasi syariah sendiri pada perbankan syariah memiliki arti yaitu surat berharga yang diterbitkan atau dijual belikan berdasarkan prinsip syariah atau sesuai landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sukuk dalam bentuk jamak yang berasal dari bahasa arab yang artinya "sakk" atau sertifikat atau bukti kepemilikan.

Menurut Yuliana[1] pengertian sukuk atau obligasi syariah yaitu perjanjian jual beli dalam jangka panjang, pada pegembalian pembayaran ditentukan pada periode atau waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam sistem pembiayaan obligasi yang muncul pada investor adalah kewajiban serta tanggung jawabanya dimana pada pembayaran manfaat secara berturut-turut seseuai kesepakatan awal

[1] Indah Yuliana, "Investasi Produk Keuangan Syariah". (UIN Maliki Press , 2010), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki tujuan sukuk atau obligasi syariah yaitu untuk memberikan sarana dan mempermudah pada kesepakatan perdagangan dalam pembelian fasilitas produksi.

Obligasi syariah ada penerbitan yang mana ada aturan akad perdangangan dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Obligasi syariah merupakan surat yang pada dasarnya penerbitannya dilakukan oleh pursahaan/pemerintah yang sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi bukti dari penanaman dana yang menjadi bentuk asset SBSN, jenis mata uangnya rupiah atau valuta asing. Obligasi syariah sendiri terdiri beberapa akad yaitu Mudharabah,Musyarakah,Istishna', Ijarah dan lainnya yang mana akad ini paling sering digunakan pada SBSN selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada keputusan Dewan Syariah Nassional (DSN) dalam fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah ialah surat hutang berharga dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar pengembalian dana obligasi pada saat jatuh tempo.[2]

Pada Obligasi syariah sendiri terdapat keuntungan yang merupakan bagi hasil/margin/fee. Pemegang obligasi syariah atau

[2] Umam, Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukuk sendiri terdapat kewajiban untuk pembayaran kembali dana obligasi pada saat batas waktu pembayaran yang ditentukan. Obligasi juga bisa diartikan surat utang jangka panjang yang penerbitannya oleh badan usaha (emiten) seperti Badan Pelaksana Pasar Modal/Perusahaan yang dimana dengan nilai nominal dan dimana waktu jatuh temponya sudah ditentukan dari awal.

Hal ini antara lain untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kembali untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera perlu disertai upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Salah satunya melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Upaya dilakukan pemerintah dalam mengembangkan sumber pembiayaan APBN adalah melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara atau secara umum kita kenal Sukuk. sebagai instrumen keuangan berbasis syariah, penerbitan sukuk negara diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan APBN yang optimal, dan dapat mendukung pengembangan industri keuangan syariah domestik maupun international yaitu pada Sukuk Negara.

Sukuk Negara adalah alternatif dalam pembiayaan APBN dengan menggunakan instrumen utang merupakan hal yang lazim dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara. dalam hal APBN sumber pembiayaan melalui utang dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman dalam negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Sejalan dengan meningkatnya posisi indonesia menjadi *middle income country*, pemerintah tidak bisa lagi menjadikan pinjaman luar negari dengan persyaratan lunak sebagai sumber utama pembiayaan APBN. dalam konteks ini Surat Berharga Negara (SBN) yang merupakan instrumen pembiayaan dengan persyaratan pasar telah menjadi sumber pembiayaan APBN yang utama.

Gambar 2.1

Klasifikasi Instrumen Pembiayaan APBN

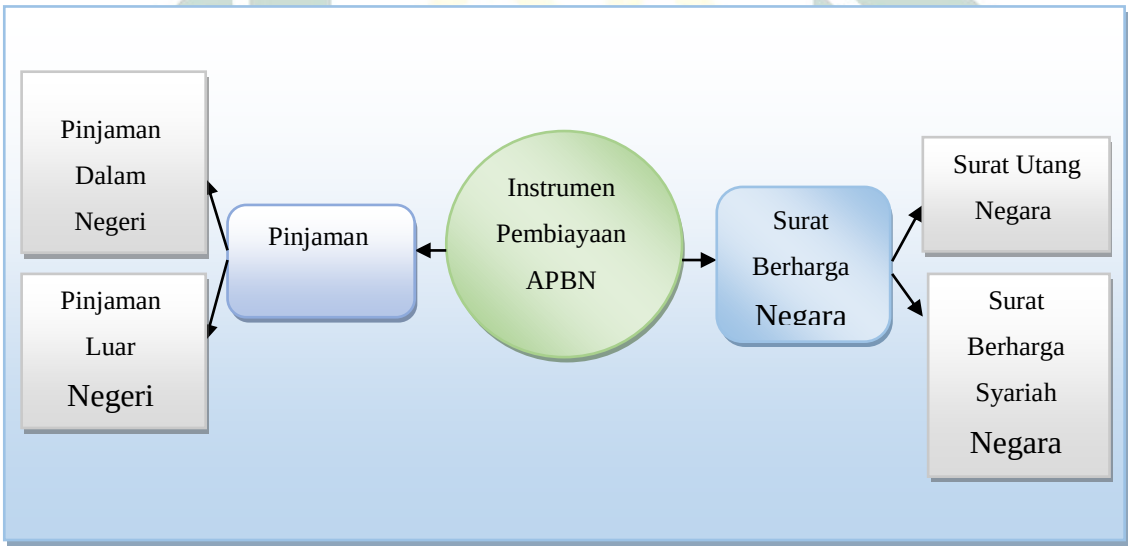

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa instrumen pembiayaan APBN terdiri dari dua jenis yakni Pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk instrumen pinjaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Sedangkan untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkkan oleh pemerintah pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu Surat Utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. SUN merupakan surat berharga yanag diterbitkan oleh pemerintah dengan menggunakan prinsip konvensional. Sedangkan SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan menggunakan prinsip syariah.

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat Berharga Negara yang penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sebagai DInstrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan underlying asset baik berupa Barang Milik Negara atau Proyek APBN. Selain itu diperlukan juga Fatwa dan Opini Syariah dalam setiap penerbitannya.

Selain sebagai sumber pembiayaan negara, Sukuk Negara juga dapat menjadi alternatif instrumen investasi yang menarik dan aman bagi masyarakat.[3] Sebagai instrumen investasi, Sukuk Negara bebas dari risiko gagal bayar (*default*), mengingat pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin Undang-Undang. Adapun imbalan Sukuk Negara sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu dapat bersifat tetap (*fixed coupon*) maupun mengambang (*variable coupon*), tergantung pada struktur yang digunakan. Instrumen Sukuk Negara sendiri dapat

[3] Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Kuangan Republik Indonesia, "Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah", (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR, 2015), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan (*tradable*) dipasar sekunder maupun tidak (*non-tradable*).

Sukuk Negara juga dapat diterbitkan dipasar perdana dalam negeri maupun international, serta dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenis instrumen Sukuk Negara sendiri ada enam yaitu : (i) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), (ii) Islamic Fixed Rate (IFR), (iii) Project Based Sukuk (PBS), (iv) Sukuk Negara Ritel (SR), (v) Sukuk Negara Indonesia (SNI), (vi) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Enam Jenis Instrumen Sukuk Negara tersebut yang dipakai untuk pembiayaan APBN adalah Sukuk Negara Ritel.

Dari penjelaskan yang sudah di jelaskan di atas keseluruhannya obligasi syariah atau sukuk yaitu sertifikat yang mempunyai nilai sama untuk mewakili bagian yang terpisah yang kepemilikan asetnya berwujud, memiliki manfaat atau jasa serta kepmelikannya juga aset pada suatu proyek. Pada saat penerimaan dana obligasi syariah atau sukuk maka terjadi penutupan pemesanan, dana tersebut diterima maka akan dimanfaatkan yang sesuai untuk tujuan penerbitan syariah atau sukuk.

2. Landasan Obligasi Syariah (Sukuk)

a.Al- Qur’an

Karna dalil memberikan penjelasan tentang larang riba pada transaksi jual beli atau investasi yang sesuai syariat islam salah satunya investasi pada sukuk yang sudah dijelaskan pada fatwa dewan syariah sebagai pedoman utama untuk berinvestasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Q.S. Al-Baqarah: 275

اَلَّذِيْنَيَأْكُلُوْنَالرِّبٰوالَايَقُوْمُوْنَاِلَّاكَمَايَقُوْمُالَّذِيْيَتَخَبَّطُهُالشَّيْطٰنُمِنَالْمَسِّ ۗذٰلِكَبِ
اَنَّهُمْقَالُوْٓ اِانَّمَاالْبَيْعُمِثْلُالرِّبٰوا ۘوَاَحَلَّاللّٰهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبٰوا ۗفَمَنْجَآءَه
ٗمَوْعِظَةٌمِّنْرَّبِّهٖفَانْتَهٰىفَلَهٗمَاسَلَفَ ۗوَاَمْرُهٗٓ اِلَىاللّٰهِ ۗوَمَنْعَادَفَاُولٰٓئِكَ
كَاَصْحٰبُالنَّارِ ۚهُمْفِيْهَاخٰلِدُوْنَ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengurangi, maka mereka itu penghuni neraka, maka kekal didalamnya.

2) Q.S. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴿١﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. Jenis-Jenis Obligasi Syariah (Sukuk)

Jenis sukuk yang banyak dikenal dan secara internasional sudah di akui dan mendapatkan pengakuan di dunia intenasional dari The Accounting and auditing Orginisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) sebagai berikut:

a. Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah (Operrational Lease)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Obligasi syariah (sukuk) Ijarah adalah manfaat atas barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan melalui pembayaran sewa, tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang dimana pemegang sukuk ijarah sendiri mendapatkan bagi hasil atau pendapatan sewa dari aset yang disewakan.

Para ahli sendiri memiliki penjelasan tentang Ijarah. Salah satunya menurut Gunawan Ijarah yaitu pemindahan manfaat suatu barang sudah ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan pada saat pembayaran sewa, tidak melibatkan pemindahan kepemilikan pada barang itu sendiri. Bagi hasil atau pendapatan yang ada pada ijarah sendiri didapat dari hasil sewa dengan penetapannya diawal kontrak.[4]Sukuk Ijarah terbagi dua bagian yaitu sukuk ijarah Sale and Lease Back dan sukuk ijarah Head Lease and Sub Lease.

1) Sukuk Ijarah Sale and Lease Back

Sukuk *Ijarah Sale and Lease Back* adalah suatu transaksi jual beli aset yang dimana pembeli aset kemudian menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan pada transaksi ini yaitu akad bai' (jual beli) dan akad

[4]Gunawan M Yasni, "Pilih Mudharabah atau Ijarah", Modal edisi: 23, 2004. Hal 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah (sewa) yang keduanya dilaksanakan secara terpisah. Pada sukuk ini kepemilikan aset berwujud yang disewakan.

Pada sukuk ijarah *Sale and Lease Back* ini aset yang bisa digunakan sebagai dasar penerbitan aset yang berwujud secara syariah yaitu bisa dijual,disewakan,dan diambil manfaatnya.Contohnyatanah,bangunan,gedung,jembatan,bandara,dan lainnya. Selain kepemilikan investor atas aset berwujud yang menjadi underlying asset sukuk, dimana hak investor atas uang sewa (ujrah) yang diterima dari hasil pembayaran atas sewa aset sukuk. pembayaran uang sewa inilah yang diwujudkan ke dalam pembayaran kupon/imbalan sukuk.

Struktur sukuk ijarah Sale and Lease Bacek dimana digunakan pada rangka yang memperoleh dana yang akan digunakan untuk tujuan umum (general financing purpose) melalui proses monetisasi aset yang dimiliki oleh originator. Proses tersebut digunakan dengan cara penjualan aset kepada investor untuk kemudian disewakan kembali kepada origantor, dan pada saat jatuh tempo aset tersebut akan dibeli kembali.

2) Sukuk Ijarah *Head Lease and Sub Lease*

Sukuk Ijarah Head *Lease and Sub Lease* adalah suatu mekanisme transaksi dimana pihak pertama selaku pemilik menyewakan aset (*head-lease*) kepada penyewa, untuk kemudian aset tersebut disewakan kembali (*sub-lease*) oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa. Pada sukuk ini aset yang digunakan adalah penerbitan yang dapat berupa manfaat aset berwujud nya. yang secara syariah bisa disewakan dan digunakan manfaatnya. Contohnya tanah, bangunan, gedung,jembatan, bandara, kapal, kendaraan, jaringan listrik dan sebagainya. Pada aset tidak berwujud seperti listrik, telepon,airtime,frekuensi juga bisa digunakan sebagai underlying asset sukuk ini. Kepemilikan investor atas sukuk dimana kepemilikan atas hak guna aset sukuk tersebut.

Berbeda dengan sukuk ijarah *Sale and Lease Back*, transfer kepemilikan aset dalam struktur Ijarah *Head Lease and Sub-Lease* dilakukan bukan melalui akad jual beli melainkan melalui akd ijarah, yaitu dengan cara menyewakan atau menjual hak guna/usufruct aset kepada investor (akad ijarah) untuk kemudian disewakan kembali.

Contohnya proyek infrastruktur yang di biayai sukuk ijarah yang dilakukan pemerintah indonesia bekerja sama dengan Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan.

Tabel 2.1

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Tahun		Jenis Proyek
2013	Rp.800 Juta	• Pembangunan jalur ganda rel kereta Api dari Cirebon-Kroya dibawah Kementerian Transportasi
2014	Rp. 1,57 Triliun	• Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api dari Manggarai-Bekasi dibawah Kementerian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Transportasi. • Pembangunan Asrama Haji di beberapa provinsi.
2015	Rp. 7,13 Triliun	• Pembangunan jalur ganda rel Kereta Api Cirebon- Kroya, Manggarai-Bekasi,Martapura-Baturaja;*elevated track* Medan-Kualanamu dibawah Kementerian Transportasi. • Pembangunanjalan (Flyover,Underpass,Bypass,Ring Road,Tol dan jembatan di beberapa provinsi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum. • Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi) dan Kantor Urusan Agama dan Asrama Haji di beberapa Provinsi dibawah Kementerian Agama
2016	Rp. 13,67 Triliun	• Pembangunan jalur *elevated track* Kereta Api Jakarta, Jawa Tengah,Sumsel dan Sumut dibawah Kementerian Transportasi. • Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi (Sumatera,Jawa,Bali,NTB,NTT,Kalimantan,Sulawesi,Maluku dan Papua) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum. • Pembangunan jalur ganda dan jalur layang rel Kereta Api dibawah Kementerian Transportasi. • Pembangunan jalan dan flyover lintas sumatera • Pembangunan infrastruktur untuk kampus (pendidikan tinggi) asrama haji dan Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama.
2017	Rp. 16,76 Triliun	• Pembangunan jalur *elevated track* Kereta Api Jabodetabek, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi • Pembangunan jalan, flyover/ underpass/ terowongan dan Jembatan Sumatera, Jawa, NTB, Borneo,Sulawesi, Maluku dan Papua. • Pembangunan pengendalian Banjir ,lahar,pengelolaan drainase utama perkotaan dan keamanan pesisir, pengelolaan bendungan,embung, dan bangunan penampungan air lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku di beberapa provinsi. • Pembangunan bangunan, fasilitas dan fasilitas pendidikan • Pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, konstruksi/pusat rehabilitasi untuk pernikahan dan haji.

Sumber : Direktorat Pembiayaan Syariah ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, RealisasiSukuk Negara Untuk Pembangunan Infrastruktur danSarana Sosial (2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obligasi Syariah (sukuk) Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Pada mudharabah sendiri dimana kerjasama dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditetapkan diawal penetapan anatar dua belah pihak, obligasi syariah (sukuk) yang keuntungan mereka yang sifatnya floating (mengambang) dan tergantung pada pendapatan nisbah.

Menurut Fitrianto obligasi syariah (sukuk) mudharabah mengacu pada pengaturan kontrak antara investor lembaga penerbit sukuk dimana investor akan memberikan kontribusi aset atau komoditas tertentu kepada lembaga penerbit Sukuk yang dimana bahwa investor akan dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang ditangguhkan berdasarkan perjanjian.[5]

Harga yang ditangguhkan biasanya termasuk harga biaya dimana investor/ pemilik tanah telah membeli aset/ komoditas ditambah mark up yang disepakati sebelumnya yang mewakili keuntungan yang dihasilkan dari keterlibatannya dalam transaksi. Pembayaran harga yang ditangguhkan dari Badan yang menerbitkan sertifikat Sukuk dapat disusun sebagai pembayaran berkala pada tanggal yang ditentukan di awal sehingga menciptakan aliran pendapatan bagi investor untuk jangka waktu transaksi.

---

[5] Achmad Room Fitrianto, "Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Provinding Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Valcano" Presented on Annual International Coference on Islamic Studies (AICIS XII). Proceeding Coference. 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh penerapan sukuk mudhrabah yaitu pada pembangunan jalan Porong dan jalan tol baru, dimana pemilik tanah yang telah menggunakan tanah yang telah digunakan sebagai lokasi pembangunan jalan memiliki hak yang sama dengan investor, yang menempatkan aset atau komoditas yang mengharapkan keuntungan mudharabah.

c. Obligasi Syariah (sukuk) Musyarakah (Partnership, Project Financing,Participation)

Menurut Nazaruddin obligasi syariah (Sukuk) musyarakah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih pada surat berharga yang diterbitan untuk berkerjasama menggabungkan modalnya dan membuat proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai usaha. [6]

Pada saat usaha terdapat keuntungan dan kerugian yang secara tiba-tiba muncul pada saat berlangsungnya proyek maka keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak masing-masing. Sertifikat kepemilikan yang tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau unit bisnis berdasarkan pengawas dari pihak manajemen.

d. Obligasi Syariah (Sukuk) Istisna' (Purchase by orderor Manufacture)

Obligasi syariah (sukuk)istishna' yaitubarang/proyek yang disepakati untuk pembiayaan dari para pihak yang memberikan

[6] Nazaruddin Abdul Wahid,"Memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah". (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2010), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modalnya. Dimana pada saat transaksi istishna' terjadi maka dilakukan penetapan harga waktu penyerahan dan penjelasan suatu proyek telah ditetapkan terlebih dahulu.[7]

Perjanjian istishna' sendiri ditetapkan pada maslahah dan ihtisan. Pembayaran dilakukan diawal untuk membeli barang dan hal lain jika pada proyek manufaktur dan kontraktor.Pemodelan pembiayaannya waktu jangka menengah.

e. .Obligasi Syariah (sukuk) salam (In-Front Payment Sale)

Obligasi syariah (sukuk) yaitu pembayaran dana dimuka dan komoditas menjadi utang.sertifikat pada obligasi syariah salam ini tidak bisa diperdangankan atau dijualbelikan pada pasar sekunder.

Salah satu parah ahli berpendapat tentang obligasi syariah berakad salam pada kajian ekonomi. Obligasi syariah salam yaitu surat berharga yang perjanjian diterbitkan oleh emiten pada waktu yang singkat. Jangka waktu yang ditetapkan pada akad salam sendiri yaitu 90 hari, 180 hari dan batas maksimal satu tahun. akad salam sendiri ada yang dilarang dan diperbolehkan., dilarang untuk menjual barang dagangan yang diurus sebelum menerima surat

[7] Mustafa Endwin, Huda ,Nurul, dan Nasution. "Investasi pada Pasar Modal Syariah", Cetakan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang dan diperbolehkan menjual kembali barang tersebut dengan kontrak yang sejajar dengan kontrak pertama. [8]

Dengan adanya produk investasi yang berupa sukuk dapat membantu untuk pembangunan nasional di indonesia salah satunya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yang merusak Infrastruktur yang terkena bencana. Dimana yang terkena dampak seperti sarana dan prasarana publik,pendidikan, kesehatan dan lainnya.

B. Sukuk sebagai Pembiayaan Sosial

Penggunaan sukuk sebagai pembiayaan infrastruktur sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 pada saat penerbitan Sukuk Negara dengan seri Project Based Sukuk (PBS). Proses yang pertama yang digunakan adalah untuk penggunaan proyek-proyek pemerintah yang tecantum dalam APBN sebagai underlying asset Sukuk Negara.

Proses kedua adalah yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah inisiatif dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Proses yang pada akhirnya sebagai menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk sebagai penyelesaian pekerjaan infrastruktur secara jelas dan teratur.

[8] Nazaruddin Abdul Wahid, Memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah.(Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah yakin bahwa dengan penerbitan Sukuk Negara sebagai solusi untuk membantu pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang yang mempunyai peluang yang besar, sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan.

   Dukungan kebijakan yang dimaksud adalah dimana Faktor pendorong yang paling banyak pada pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara yang menggambarkan dari pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang berisi mengenai Surat Berharga Negara atau Sukuk Negara. aturan tersebut yang menjadi patokan utama atau bisa disebut landasan hukun yang terpenting untuk pemerintah dalam hal menerbitkan Sukuk Negara.

   Pada peraturan tersebut yang dapat menjadi kewenangan untuk pemerintah menggunakan Barang Milik Negara (BMN) yang sebagai underlying asset dan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui penerbit Sukuk Negara, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah dapat mengatur komposisi untuk penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek,sehingga hasil dari penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan sebagai pendorong pada pembangunaninfrastruktur. (Hariyanto,2017)

2. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar

   Berdasarkan arus percepatanpembangunan infrastruktur, pemerintah sudah menetapkan hal yang paling penting untuk pembangunan infrastruktur yang dimasukkan dalam nawacita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperlukannya dana yang besar berpeluang untuk Sukuk Negara yang akan bisa berfungsi untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Pada Sukuk Negara sendiri dapat membantu ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah sebagai penentu sumber penerimaan negara untuk pendanaan infrastruktur.

3. Kemampuan Sukuk Negara yang sangat besar.

Pada permbangan ekonomi islam yang lebih cepat, berkembang juga pengetahuan yang luas untuk memilih instrumen investasi yang berdasarkan syariat islam. Pengerahuan yang menambah investor tentaang cara berpikir "Syariah Minded" atau sekedar berinvestasikan pada instrumen syariah. Pada karya tulis yang ditulis oleh Achmad Room, yang menjelaskan dimana sukuk bisa menjadi instrumen *social-financing*.

Dimana memberikan pembiayaan alternatif dalam proses mitigasi bencana lumpur di Porong Sidoarjo dengan instrumen pembiayaan Sukuk mudarabah. Dimana menunjukkan bahwa instrumen keuangan islam ini dapat membantu untuk pembiayaan pemulihan bencana.

Pada saat ini Sukuk yang menjadi instrumen pembiayaan utama yang sebelumnya yang pernah ada yaitu pembiayaan pada Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman langsung. Walaupun sukuk bisa dibilang yang paling baru keberadaanya yang dampaknya tidak pada keinginan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanja Negara (APBN). sukuk juga mempunyai fungsi yang berdampak positif dengan jangka waktu delapan tahun pada bentuk nyata sebagai pembiayaan. Berikut adalah beberapa dampak strategis yaitu:[9]

a. Membawa perkembanganindustrikeuangan syariah nasional

Sebagian pengamat menjabarkan hubungan penerbitan sukuk dengan perkembangan industri keuangan syariah. Dasar kepemilikan sukuk negara dalam negeri yang berada pada perbankan syariah yang menjadi penyediaan aset yang terjaga untuk perbankan syraiah berpengaruh positif dan mendapatkan peningkatan pada nilai total pembiayaan perbankan bagi GDP sebagai perhitungan bpada pertumbuhan perbankan syariah tersediannya sukuk sekarang sebagai jalan keluar untuk investasi pada industri keuangan syariah yang ingin mengembangkan asetnya melalui aset. Jangka waktu pada sukuk sendiri terbagi ada yang tenornya 6 bulan (jangka pendek) sampai tenornya diatasnya 10 tahun (jangka panjang) dengan adanya batasan waktu bisa meringankan perindustrian untuk mengatur portofolio.

b. Menambah jumlah pembiayaan infrastruktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sukuk memiliki nomor untuk penerbitan atau seri-seri pada sukuk

[9] Hariyanto Eri, "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur, 2017 dalam http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807,diakses27 september 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana sukuk sendiri memakai underlying assetseperti proyek infrastruktur yang sudah menimbulkan peningkatan luasnya ruang fisikal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada belanja negara ditarik dari bagian pembiayaan. Dengan ini pemanfaatan pada pembiayaan infrastruktur dalam jangka waktu kurun satu tahun anggaran yang sangat bertambah proyek pemerintah yang mendapatkan biaya dari belanja ataupun pembiayaan. Dimasa depan pemerintah juga akan merencanakan agar sukuk lebih terfokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan sukuk bagi pembangunan infrastruktur yang mendapatkan kesempatan yang besar kepada masyarakat dimana ikut andil dalam membantu pemabngunan negara.

c. Menekankan tertib pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)

Pemberi underlying asset pada penerbitan sukuk dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) yang sudah membawa sebagai penetapan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Underlying asset seperti Barang Milik Negara (BMN) yang akan dipakai dalam penerbitan Sukuk yang menunjukkan pada kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (clean) dan mempunyai dokumen pendukung yang lengkap (clean) sebagai bukti kepemilikan dan lain-lain. Pada persyaratan yang membawa Kementerian/Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyediakan kelengkapan surat sebagai revaluasi aset untuk menaikan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah.

d. Menekankan tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah.

PelaksanaanproyekinfrastrukturolehKementerian/Lembaga,dijadikan untuk *underlying asset* pelaksanaan proyek di dorong menjadi lebih prioritas pada kemajuan pelaksanaan proyek dan pngambilan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktu dimana itu adalah syarat syariah yang diatur dalam komponen akad yang dipakai. Penyelesaian proyek yang lewat batas waktu yang bisa menyebabkan ketidakcocokan kontrak yang telah susun, sehingga harus dibatasi agar tidak menyebabkan konsekuensi hukum yang lebih komprensif.

e. .Alternatif instrumen investasi bagi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang berada pada industri keuangan ataupun non-keuangan juga individu masyarakat Indonesia, tentu juga memiliki instrumen investasi untuk menambah nilai asset yang mereka miliki.Dengan diterbitkannya sukuk yang mendapatkan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki keuntungan daana. Sukuk juga menjadi lebih memikat karena telah dijamin pembayaran imbalan maupun pokok untuk invetasi oleh Pemerintah, sehingga bisa disimpulkan bahwa instrumen investasi tanpa risiko (zero risk). Dimana tanpa risiko, investasi untuk sukuk yang diakui dapat mengguntungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika diibaratkan pada instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama dengan deposito. Pada dasarnya sukuk sendiri memberikan keuntungan atau imbal hasil yang sangat bermanfaat jika dibandingkan pada investasi deposito yang penerbitannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui diterbitkannya sukuk untuk investor secara langsung juga telah menjadi pendukung perkembangan.

f. .Membantu Bank Indonesia melaksanakan Open Market Operation (OMO)

Untuk melindungi nilai inflasi *(inflation targeting*)otoritas moneter (BI) untuk melaksanakan sebagian kebijakan yang dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Rata-rata yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melaksanakan operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) alternatif untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.Dengan adanya sukuk dengan jangka waktu yang pendek yaitu 6 bulan. Bank Indonesia bisa menggunakan instrumen pelaksanaan *Open Market Operation* (OMO). Bank Indonesia sendiri bisa menggunakan Sukuk jangka waktu pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang Sukuk berjangka waktu (tenor) pendek. Saat ini pemerintah lebih giat mempromosikan gerakan untuk berinvestasi seperti sukuk yang mana tujuan mengatasi masalah pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional yang ada di Indonesia. banyak negara yang menggunakan sukuk sebagai solusi untuk pembangunan di negara mereka dan juga bisa mencapai keberlanjutan ekonomi,sukuk dapat menjadi sumber pendanaan untuk membiayai pemulihan bencana alam.

Beberapa negara didunia banyak menggunakan sukuk seperti negara Timur Tengah menggunakan sukuk sebagai pembiayaan infrastruktur diantaranya Uni Emirat Arab untuk membiayai infrastruktur yaitu pusat pendingin (AC) di sebuah kawasan perkotaan (Republika,2010). Bahrain menerbitkan sukuk untuk membiayai reklamasi tanah dan pembangunan infrastruktur dasar (untuk pembangunan perumahan kelas dunia dan tempat liburan yang dikenal sebagai "*Durrat Al Bahrain*), Pakistan menerbitkan sukuk untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 24 Mega Watt (MW), Malaysia menerbitkan sukuk untuk pembangunan jalan tol, membangun pembangkit listrik,pembangunan jembatan penang. Dengan adanya sukuk memungkinkatn untuk memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar. Selain itu juga memiliki karakteristik yang fleksibel sebagai persyaratan pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang.

Namun demikian,berbeda dari penjelasan model-model pengembangan sukuk di atas, dimana aset pada penerbitan sukuk ini digunakan sebagai underlying asset. Dalam model yang diajukan ini, penulis memberikan usulan mekanisme sukuk istishna'-ijarah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempatkan pada pembiayaan untuk membantu pendanaan dan juga meningkatkan share sukuk di Indonesia.

C. Pemulihan Bencana Alam

Menurut Undang-undang no.24 Tahun 2007 pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.[10]Setelah bencana terjadi dan setelah proses penanganan darurat terlewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang menandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Ada lima kegiatan yang dilakukan pada saat rehabilitasi : (i)pembenahan lingkungan daerah bencana; (ii) pembenahan prasaranan dan sarana umum; (iii) penyerahan bantuan pembenahan rumah masyarakat;(iv) penyembuhan sosial psikologis;(v) pelayanan kesehatan; (vi) rekonsiliasi dan resolusi konflik;(vii) perbaikan sosial ekonomi budaya;(viii) perbaikan keamanan

[10] UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketertiban; (ix)perbaikan fungsi pemerintah; dan (x) perbaikan fungsi pelayanan.[11]

Aktifitas pemulihan lebihnya mencermati peraturan yang mengenai standar konstruksi bangunan, keadaan sosial,adat istiadat,budaya dan ekonomi. Pemulihan prasarana dan sarana umum adalah aktifitas pemulihan prasarana dan sarana umum bisa memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran aktifitas ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.Pada penelitian ini, pemulihan dibatasi pada pembenahan sarana dan prasarana umum serta pemulihan ekonomi.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada singkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertibsn, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.[12]Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta seluruh anggota masyarakat. Sebagai contoh rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu tidak kurang dari 5 tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum bencana.

---

[11] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

[12] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut pasal 60 UU no. 24 tahun 2007, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Dalam hal mengatur proses rekonstruksi, diharuskannya mengevalusi untuk pengelolaan pembiayaan pemulihan pasca bencana menurut Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 11 Tahun 2008[13]. Dalam perka tersebut dijelaskan bahwa untuk dana penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). sementara itu, untuk membantu pendapatan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran penyelesaian bencana yang bersumber dari APBD.

Jika anggaran bersumber pada APBD yang seperti dijelaskan untuk pengelolaan pembiayaan pemulihan pascabencana yang bisa memanfaatkan anggaran bantuan sosial bersistem sumbangan yaitu anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.[14]

Pemulihan permohonan anggaran bantuan untuk penyelesaian pemulihan pascabencana yang berasal dari pemerintah ke pemerintah

[13] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yang membutuhkan konfirmasi dari tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dengan tetap berada di bawah koordinasi BNPB. Konfirmasi tersebut untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah secara proposional, dilaksnanakan bersama-sama dengan verifikasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi.

Pembiaayaan sistem pemulihan yang bisa bersumber pada peran serta swasta, masyarakat maupun institusi lain nonpemerintah melalui koordinasi BNPB atau BPBD pada tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah di tingkat pusat, serta pemerintah daerah tingkat daerah yang memberikan fasilitas dalam hal ini peran pihak swasta, masyarakat serta institusi lain non pemerintah dalam program pembehanahan dan pemulihan yang menciptakan dan menjamin akuntabilitas, efektifitas,transpransi dalam pembagian anggaran untuk digunakan.

Dalam hal ini keperluan anggaran aktifitas pembulihan yang lebih besar, sedangkan kesiapan anggaran dalam negeri dan sumbagan terbatas, maka dilakukannya pinjaman luar negeri yang bisa membantu yang berasal dari pembiayaan dalam hal aktifitas pemulihan atau perbaikan, dengan syarat seprti pinjaman yang ringan, juga pendistribusi pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek yang sedang berlangsung yang berasal dari aktifitas pemulihan dan perbaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMULIHAN BENCANA DI INDONESIA

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan terdapat banyak gunung aktif dan dikelilingin oleh tiga lempeng tektonik. Indonesia kaya akan alam yang mana hampir 100 lebih gunung di Indonesia yang menjadi salah satu dampak Indonesia disebut negara yang paling rawan yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan salah satunya bencana alam gempa yang terbesar di aceh.

Bab III meliputi satu sub bab yang terdiri dari empat sub bab yaitu pertama, mengenai gambaran umum bencana alam di Indonesia. Kedua, gambaran bencana gempa bumi di Jogja-Jawa Tengah. Ketiga, Gambaran bencana gempa bumi di Sumatera Barat dan Bengkulu. Keempat, pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia, juga membahas tentang kerusakan dan kerugian yang dialami oleh daerah yang terkena bencana alam yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jogja-Jawa Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Bencana Alam di Indonesia

1. Gambaran Umum Bencana Alam di Negara Indonesia

Indonesia yang rentan terhadap bencana di seluruh dunia, lamtaran lokasi ini dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik. Di Indonesia yang rawan pada aktifitas seismik. Sebagian 200 gunung berapi, dan lebih dari 70 diantaranya masih berfungsi. Indonesia mempunyai 127 gunung berapi tertinggi di seluruh dunia. Indonesia yang selalu mengalami tanah longsor,banjir,dan gempa bumi. Ancaman terberat yaitu banjir jika dihitung menurut proposional pada PDB dan jumlah kematian.

Kebutuhan hutan yang sangat berisiko yang perlu dicermati, terlihat dari kejadian kebakaran hutan pada tahun 1998 telah terjadinya peristiwa El Nino. Akibat risiko enam bencana penting seperti angin topan,kekeringan,gempa bumi, banjir,tanah longsor,dan gunung berapi yang ada di Indonesia.

Peningkatan kerawanan pada bencana-bencana yang dikirakan mencapai pada jumlah kematian yang diakibatkan dengan bencana tertentu dan peningkatan kerugian ekonomi pada wilayah yang meliputi oleh Bank Dunia juga tingkat kekayaan negara, yang bisa di hitung pada informasi kerugian historis dalam waktu 20 tahun. bahwa dampak untuk indonesia berada pada tingkat atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana berisiko jumlah kematian pada semua tipe bencana dalam hal korban jiwa dari bencana alam, sedangkan pada Pulau Sumatera dan Jawa yang mengalami risiko bencana alam yang besar dalam kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam.

Menurut EMDAT CRED[1] tentang perangkingan tipe pada enam bencana alam Indonesia menjadi negara yang paling berisiko tinggi yang mengalami bencana tsunami dan tanah longsor. Dari 162 negara, Indonesia yang berpotensi tinggi terhadap tanah longsor dengan jumlah 197.372 orang yang terancam.[2]

Pada 10 tahun terakhir, setiap tahunnya terjadi 2000 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebagian besar bencana terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Tak hanya itu bencana besar yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah tsunami dan gempa bumi yang melanda Indonesia seperti bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi baru-baru ini di Lombok dan Palu yang menewaskan ribuan orang.

[1] EMDAT CRED adalah Emergency Event Database Centre for Research on the Epidemiology of Disasters merupakan anak lembaga PBB bidang kebencanaan.
[2] Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank, "Lessons from the Efforts to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia", Technical Note, (2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Tren Kejadian Bencana Alam di Indonesia

Sumber: bnpb go.id

Bencana yang terjadi tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi menghancurkan atau merugikan perekonomian. Melihat kejadian yang pernah terjadi sekitar 15 tahun lalu tepatnya di daerah aceh pada 26 desember 2004 yang mana bencana yang terdasyat yang menewaskan 12 ribu lebih orang hilang, dan 700 ribu orang mengungsi juga menewaskan 100 ribu orang. Secara ekonomi daerah yang mengalami kerugian hingga 41,4 Triliun Rupiah atau setara 4,5 milyar Dollar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada Mei 2006 yang mengalami kerusakan besar dan kerugian hampir 29 triliun rupiah.[3]Sedangkan total kerugian akibat kerusakan karena gempa di Lombok Barat pada tahun 2018 mencapai Rp 3,59 triliun dan total kebutuhan Rp 2,08 trilun dan Lombok Utara mencapai Rp 3,19 triliun dan total kebutuhan rehabilitasi Rp 3,09 triliun.[4]

Secara ekonomi, pengaruh bencana tsunami yang terjadi di Aceh terhadap PDB[4]Indonesia memang relatif kecil sekitar 0,3%. Tetapi, jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Aceh, kerugian yang diakibatkan bencana sebegitu pengaruhnya,yakni mencapai 45% PDRB. Begitu juga dengan Yogyakarta yang mengalami kerugian mencapai 41% dari PDRBnya. Kejadian bencana alam di Indonesia ini telah membuka mata betapa besarnya pengaruh bencana alam terkususnya dari sektor ekonomi. Maka diperlukan kesadarana untuk membangun kembali sistem penangulangan bencana secara bertahap.

[3]Ibid
[4] Produk Domestik Bruto, pendapatan di suatu wilayah negara selama kurun waktu 1 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Gambaran Bencana Gempa Bumi Jogja- Jawa Tengah

Pada tanggal 27 Mei 2006 di daerah Yogyakarta dekat kota sejarah terjadi gempa bumi yang mengguncang wilayah indonesia bagian tengah, tepatnya kurang lebih 33 kilometer dari selatan kabupaten bantul, telah terjadi gempa yang berkuatan 5,9 Skala Ricter berlangsung sekitar 52 detik. Terjadinya gempa ini termasuk kategori termasuk relatif dangkal yaitu 33 kilometer dibawah tanah, gempa ini termasuk gempang terdasyat dari gempa yang pernah terjadi yang mana mengakibatkan kerusakan yang kuat, khususnya pada daerah di Provinsi Yogyakarta Kabupaten Bantul dan Di Provinsi Jawa Tengah Klaten.[5]

Hasil laporan analisis yang dipersiapkan BAPPENAS, yang mana di dukung oleh tim yng terdiri dari Pemerintah Indonesia dan Pakar International diperkirakan total kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi sebesar Rp29,1 Triliun atau setara US$ 3,1 miliyar. Akibat dari bencana tersebut mengalami kerugian yang sangat banyak terjadi dibandingkan dampak tsunami di Sri Lanka yang terjadi pada tahun 2004 juga skalanya sama dengan gempa bumi Gujarat yang terjadi pada tahun 2001 juga gempa bumi beberapa tahun terjadi di negara Pakistan.[6]

---

[5] Laporan BAPPENAS, Pemerintah Provinsi dan Daerah, D.I. Yogyakarta,Pemerintah Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra International, "Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah",publikasi, Juli 2016.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Perbandingan Bencana-bencana International

Negara	Bencana	Tanggal	Jumlah Korban Tewas	Kerusakan & Kerugian (Juta US$)	Kerusakan & Kerugian (Juta US$, konstan 2006)	Harga
Turki	Gempa Bumi	17 Agustus 1999	17. 127	8.500	10.281	
Indonesia (Aceh)	Tsunami	26 Desember 2004	165.708	4.450	4.747	
Honduras	Topan Miteh	25 Oktober – 8 November 1998	14.600	3.800	4.698	
Indonesia (Yogya-Jawa Tengah)	Gempa Bumi	27 Mei 2006	5. 716	3.134	3.134	
India (Gujarat)	Gempa Bumi	26 Januari 2001	20.005	2.600	2.958	
Pakistan	Gempa Bumi	8 Oktober 2005	73.338	2.851	2.942	
Thailand	Tsunami	26 Desember 2004	8.345	2.198	2.345	
Sri Lanka	Tsunami	26 Desember 2004	35.399	1.454	1.551	
India	Tsunami	26 Desember 2004	16.389	1.224	1.306	

Sumber : Pusat Kesiapan Bencana Asia (Asia Disaster Preparedness Center).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan paling parah terjadi yang berpusat pada permukiman beserta bangunan-bangunan pada kawasan wisata, yang sangat serius adalah rumah-rumah pribadi yang sangat berdampak, senilai kurang lebih dari jumlah keseluruhan kerusakan dan kerugian mencapai Rp15,3 triliun. Pada kawasan swasta yaitu bangunan-bangunan dan aset-aset produktif yang mengalami rusak parah yang dihitung sebesar Rp 9 triliun juga di hitung akan kehabisan pendapatan yang berarti dimasa yang akan datang. Sangat berakibat penting bagi usaha kecil juga menengah,dikarena area termasuk pada pusat industri kerajinan tangan yang berskala kecil pada saat ini berkembang di negara Indonesia. Di kawasan sosial juga mengalami kerugian terkhususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan,yang diperkirakan kerugian yang relatif kecil jauh dari nilai kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh tsunami Aceh dan Nias. Bisa kita lihat di gambar dibawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Jogja-Jateng (dalam Milyar Rupiah)

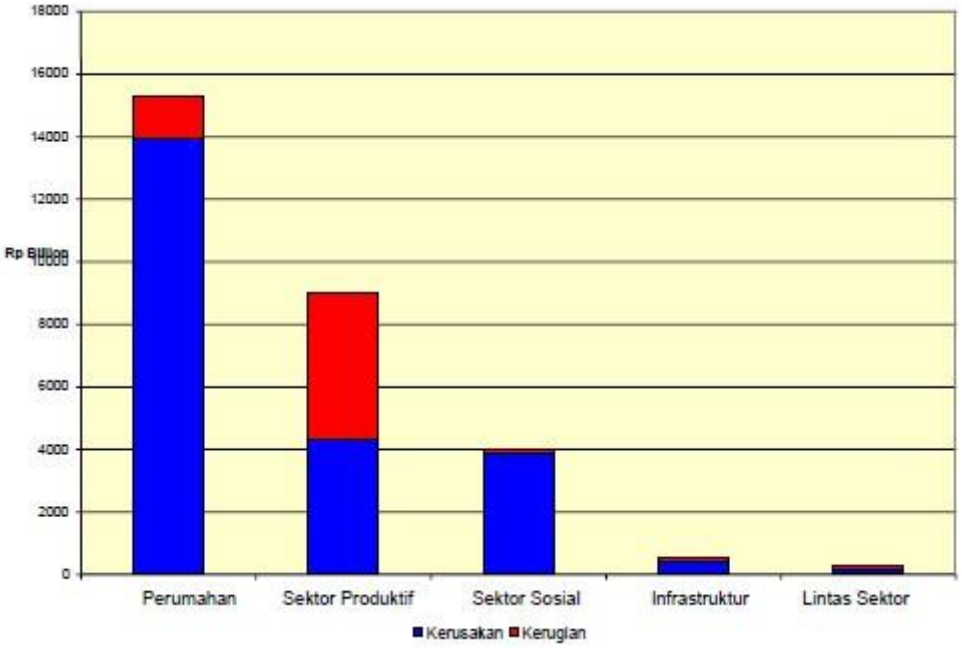

Kerugian dan Kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi yang mencapai Rp 29,1 triliun atau setara US$ 3,1 miliar dan di hitung kerusakan yang diperkirakan sebesar Rp22,75 triliun atau protasenya 78% dari nilai keseluruhan dan nilai keseluruhan kerugian ekonomi yang mendekati Rp 6,40 triliun atau prosentasenya sebesar 22%. Jumlah kerusakan yang mewakili angka pembiayaan termasuk donasi oleh korban, yang akan diperlukan untuk pemulihan. Jumlah kerugian juga pengganti dari pengurangan aktifitas ekonomi dan pendapatan pribadi dan keluarga yang akan terjadi selama berbulan-bulan selanjutnya risiko bencana gempa bumi dengan data tabel dibawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Ikhtisar Kerusakan dan kerugian gempa Jogja – Jateng
(dalam Milyar Rupiah)

Jenis Kerugian	Efek Bencana		Total	Kepemilikan	
	Kerusakan	Kerugian		Swasta	Pemerintah
Perumahan	13.915	1.382	15.296	15.296	0
Infrastruktur	397	154	551	76	476
Transportasi dan Penghubungan	90	0	90	0	90
Energi	225	150	375	0	375
Air dan Kebersihan	82	4	86	76	10
Sektor Sosial	3.906	77	3.982	2.112	1.870
Pendidikan	1.683	56	1.739	584	1.154
Kesehatan dan Perlindungan Sosial	1.569	21	1.590	1.030	560
Budaya dan Agama	654	0	654	498	156
Sektor Produktif	4.348	4.676	9.025	8.854	170
Pertanian	66	640	705	700	5
Perdagangan	184	120	303	138	165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Industri	4.063	3899	7962	7.962	0
Pariwisata	36	18	54	54	0
Lintas Sektor	185	110	295	48	247
Pemerintah	137	0	137	0	137
Perbankan dan Keuangan	48	0	48	48	0
Lingkungan	0	110	110	0	110
Jumlah Total (Juta)	22.751	6.398	29.149	26.386	2.763
Jumlah Total, (US $)	2.446	688	3.134	2.837	297

Sumber: Penilaian Kerusakan dan kerugian Bencana alam di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Juli 2016.

Gempa bumi yang berpengaruh atas kawasan-kawasan produktif yang ada diperekonomian. Kerugian dan kerusakan yang dialami oleh kawasan produktif sebesar 31% atau senilai dengan Rp 9 triliun. Hampir seluruh perusahaan, mayoritasnya adalah usaha kecil juga menengah, toko pedagang dan sumber pencariannya yang hilang. Kerusakan yang juga berpengai ruh pada perumahan. Kerugian yang berwujud aset pribadi yang tanpa di asuransikan sebagai tantangan terberat yang untuk membangun kembali daerah-daerah yang terkena dampak bencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan irigasi, sistem, pertanian, dan sektor perikanan juga berpengaruh, walaupun akibat yang langsung pada pertanian jelas kerusakan dan kerugian yang dialami kecil oleh kawasan produktif secara menyeluruh, serta besar total nilai kerugian sebesar Rp 9 triliun. Kerusakan yang terjadi salah satunya dari prasarana dan aset produktif secara umum yaitu diperkirakan kurang lebih dari akibat keseluruhan. Beberapa kerusakan yang berpengaruh bermula dari gempa bumi yang terkena pada kegiatan atau usaha kecil dan menengah (UKM), yang sudah berperan menjadi penghasilan utama perekonomian di daerah-daerah yang terkena dampak bencana.

2. Gambaran Bencana Gempa Sumatera Barat dan Bengkulu

Gempa bumi juga terjadi di barat pulau Sumatera atau barat daya Bengkulu pada tanggal 12 September 2007 dengan kekuatan 7,9 Skala Richter. Pada daerah Bengkulu yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan sebesar Rp 1.006.756.061.640 dengan rincian kerugian sebesar Rp 3.242.000.000 dan kerusakan Rp 1.003.514.061.640,-kerusakan yang terjadi pada sektor perumahan.[7]

[7] Laporan bersama BAPPENAS, Pascabencna Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat 12 September 2007, "Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat", publikasi oktober 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah-rumah yang terkena dampak tersebut 100% milik swasta atau masyarakat umum yang senilai kurang lebih dari setengah pada total keseluruhan kerugian dan kerusakan sebesar Rp 449,5 miliar dengan prosentase 44% dan terkena dampak yang paling parah kedua pada sektor infrastruktur dengan total kerugian dan kerusakan sebesar Rp 179,6 miliar, kerusakan dan kerugian tersebut terjadi pada tiga bagian subsektor yaitu pertama, sektor Infrastruktur Transportasi sebesar Rp 55,9 miliyar yang meliputi baik transportasi darat (jalan dan jembatan),transportasi laut (dermaga) maupun transportasi udara.

Kedua sektor energi yang mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp 3,67 milyar, ketiga pada sektor Sumber Daya Air mengalami kerusakan dan kerugian yang cukup para pada prasarana irigasi teknis,sungai dan saluran irigasi sekunder dan tersier, serta rusaknya beberapan bangunan bendung/tanggul sungai yang total biaya kerusakan dan kerugian mencapai Rp 120 miliyar.

Sedangkan pada daerah Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kerugian dan kerusakan total jumlah sebesar Rp881,8 miliyar dengan kerusakan sebesar Rp 879,3 miliyar dan kerugian sebesar Rp 2,5 miliyar meliputi lima sektor. dampak yang terkena bencana yang pertama sektor perumahan yang mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp 391,8 miliyar yang kedua mengalami kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kerusakan yang berada pada kawasan atau sektor sosial atas rincian rincian kerusakan Rp 325,9 miliyar dan kerugian mencapai Rp 2 miliyar yang meliputi sarana kesehatan,pendidikan, ibadah, dan lembaga sosial.

Pada gempa bumi di Sumatera Barat yang merugikan masyarakat pada sektor produktif yang mengalami kerusakan sebesar Rp83,8 miliyar dan kerugian mencapai Rp450 juta, yang paling parah terjadi pada fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran (pertokoan) dan perbankan merupakan milik swasta.

Tabel 3.3

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Bengkulu dan Sumatera Barat

No	Sektor /Subsektor	Nilai Kerusakan		Nilai Kerugian		Total
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Bengkulu	Provinsi Sumatera Barat	
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
A	Perumahan	449.448.75	391,845.25	-	-	841.294.00
B	Infrastruktur	179.625	51.690.60	-	-	231.315.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1. Transportasi 2. Energi 3.Posdan Telekomunikasi 4. Infrastruktur Sumber Daya Air	55.930 3.670 - 120.025	39.014.69 2.047.91 - 10.628.00	- - - -	- - - -	94.944.81 5.717.55 - 130.653.00
C	Sosial	85.899	325.997.45	80.00	2.031.00	414.007.45
	1. Kesehatan 2.Pendidikan 3.Agama 4.Lembaga Sosial	11.100 11.239 62.085 1.475	4.495.00 222.128.00 81.177.00 18.197.45	- 80.00 - -	100.00 1.931.00 - -	15.695.00 235.378.00 143.262.00 19.672.45
D	Ekonomi	26.145	83.800.00	2.202.00	450.00	112.596.75
	1.Perdangangan 2.Perikanan	17.400	82.000.00 -	2.202.00 -	450.00	102.052.00 8.744.75
	3. Perindustrian 4. Perbankan	8.745 - -	- 1.800.00	- -	- - -	- 1.800.00
E	Lintas Sektor	262.397	26.000.00	960.00	-	289.356.80
Total		1.003.514	879.333.30	3.242.00	2.481.00	188.570.36
Total Nilai Kerusakan dan Kerugian		1.882.847		5.723		1.888.570
Grand Total		1.888.570				

Sumber: Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat 12 September 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan dan kerugian yang dialami pada daerah provinsi Bengkulu dan Sumbar yang paling banyak adalah kepemilikan swasta pada sektor perumahan sebesar Rp841.294.000,- sedangkan sektor infrastruktur dilihat dari tabel tersebut yang paling banyak mengelamai kerugian pada kepemilikan pemerintah senilai Rp196.300.000,- sedangkan kepemilikan swasta lebih sedikit kerusakannya sebesar Rp35.015.000,- sektor sosial kerugian dan kerusakan senilai Rp351.491.000,- sektor ekonomi juga sama lebih banyak kerugian pada kepemilikan pemerintah yaitu Rp102.052.000 jumlah keseluruhan kerugian dan kerusakan yang di alami pada kepemilikan pemerintah dan swasta mencapai Rp 2 Triliun.

Tabel 3.4

Total Jumlah Kerusakan dan kerugian dari Kepemilikan Pemerintah Dan Swasta

No.	Sektor /Subsektor	Kepemilikan	
		Pemerintah	Swasta
		(Rp Juta)	(Rp Juta)
A	Perumahan	-	841.294.00
B	Infrastruktur	196.300.36	35.015.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1. Transportasi 2. Energi 3. Pos dan Telekomunikasi 4. Infrastruktur Sumber Daya Air	94.944.81 5.717.55 - 95.638.00	- - - 35.015.00
C	Sosial	351.491.32	62.516.13
	1. Kesehatan 2.Pendidikan 3.Agama 4. Lembaga Sosial	15.695.00 235.378.00 94.123.13 6.295.18	- - 49.138.87 13.377.26
D	Ekonomi	102.052.00	10.544.75
	1.Perdangangan 2. Perikanan 3. Perindustrian 4. Perbankan	102.052.00 - - -	- 8.744.75 - 1.800.00
E	Lintas Sektor	289.356.80	-
Total		939.200.47	949.369.88
Total Nilai Kerusakan danKerugian		939.200	949.370
Grand Total		1.888.570	

Sumber: Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat 12 September 2007 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Total Jumlah Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat

No	Provinsi	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian	Prosentase
1	Provinsi Bengkulu	1.003.514.061.640	3.242.000.000	1006.756.061.640	53.31%
2	Provinsi Sumatera Barat	879.333.297.693	2.481.000.000	881.814.297.693	46.69%
	Total	1.882.847.359.333	5.723.000.000	1.888.570.359.333	100.00%

Sumber: Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat 12 September 2007.

3. Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia

Menurut Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengenai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. pemerintah bertanggung jawab atas tersebut untuk melakukan: 1) Memberikan bantuan; 2) Memberikan bantuan keuangan (sebagian) untuk rekonstruksi tempat tinggal pribadi; 3) Melakukan pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan publik. Laporan mengenai kerusakan dan kehilangan dari akibat bencana besar yang terjadi menunjukkan peningkat yang tetap dari yang dibutuhkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekonstruksi, dengan kebutuhan besar untuk perumahan, yang diikuti oleh infrastruktur publik seperti jalan,sekolah dan fasilitas kesehatan juga pemerintahan).[8]

Dana anggaran untuk pengalokasi kegiatan pemulihan pascabencana, yang dibiayai melalui dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang dibuat selama melalui rapat anggaran di Parlemen. Dengan melakukan persiapan dan persetujuan untuk anggaran yang sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dimana pembiayaan tersebut sebagai pembiayaan tambahan pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun;ada dua yaitu persiapan anggaran dimana sebelum bulan Desember dan perbaikan anggaran di tengah bulan atau tepat pada bulan Juni.

Dengan pemberian waktu bantuan yang tergantung pada keterlambatan di dalam proses persiapan, sementara aturan untuk perbaikan dan evaluasi anggaran yang mempengaruhi keterpentingan untuk realokasi dana.

Temuan dan transfer daana rekonstruksi pascabencana dapat memakan waktu yang cukup lama hingga satu tahun kedepan, tergantung pada kapan terjadinya bencana. Misalnya yang terjadi di Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dimana terjadinya bencana tersebut pada akhir tahun dan ketika alokasi anggaran untuk tahun berikutnya telah disetujui.

Begitu juga alokasi dana tambahan anggaran yang utama untuk tanggap bencana yang harus selesai melalui perbaikan anggaran tengah

[8] GFDRR World Bank, "Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration", publication (Oktober,2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun pada tahun 2005, yang berpengaruh terhadap kebutuhan untuk pembiayaan tambahan tanggap darurat. Begitu juga bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 2006, dimana perbaikan anggaran tengah tahun yang dimulai pada bulan juni yang menghasilkan keputusan dana yang cepat.[9]

Awal untuk pembiayaan pemulihan bencana alam itu dengan pemerintah kabupaten yang sebagai pembuat rencana pemulihan. Berikutnya rencana tersebut diharapkan akan dibiayai dari anggarannya sendiri yang sesuai sebagai realokasi anggaran pascabencana. Jika anggaran pemulihan tersebut melebihin 20% persen dari total anggaran, maka pemerintah kabupaten dapat meminta dukungan provinsi kepada pemerintah provinsi atau langsung meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

Setelah itu Komite evaluasi pascabencana, yang menilai kebutuhan pembiayaan, termasuk perwakilan dari badan-badan pemerintah yang diketuai oleh BNPB. Setelah komite evaluasi setuju maka permintaan keuangan diajukan oleh BNPB ke Kementerian Keuangan. Kementerian keuangan juga meminta persetujuan untuk rencana pembiayaan dari Parlemen selama perbaikan anggaran tengah tahunan.[10]

Pendukung anggaran dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kemudian di pindahkan ke pemerintah daerah. Dimana pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait di bawah

---

[9] GFDRR World Bank, "Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration", publication (Oktober,2011),12.
[10] Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia", (Tesis:2019), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan BNPB dan BPBD. Pada alur ini dijelaskan sumber utama pembiayaan pascabencana menurut GFDRR ada tiga Pembiayaan operasi pasca bencana di Indonesia; Pertama Fase Bencama terbagi atas tiga sub yaitu; Bantuan tanggap darurat,Pemulihan, Rekonstruksi. Kedua, Sarana dan Pendanaan yang terbagi tiga pertama sebagai anggaran tanggap darurat, dana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengeluaran modal untuk anggaran tahun. ketiga sumber biaya didapat dari APBD atau APBN.

Pada penanggulangan bencana dibutuhkan waktu hingga beberapa bulan dimana untuk menarik dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah bendahara umum Negara. dengan demikian timbulnya penundaan dalam operasi pemulihan pada pascabencana, dalam pemenuhan fasilitas public dan juga program mata pencarian. Selain karena terhalang kewenangan seperti pemabngunan infrastruktur fisik yang mana termasuk kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu juga dana dari pemerintah pusat yang sangat terbatas. Sehingga dibutuhkannya suntikan dana dari partisipasi lainnya untuk pemulihan pembiayaan bencana alam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MODEL DAN POTENSI SUKUK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH PASCA BENCANA DI INDONESIA

Kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam dibutuhkan dana yang sangat besar, dimana dana APBN tidak sepenuhnya bisa membantu secara menyeluruh untuk pembangunan kembali infrastruktur yang terkena bencana alam di Indonesia. Peneliti ini mengangkat sukuk untuk membantu pembiayaan pembangunan pasca bencana di Indonesia.

Pada Bab IV ini terdapat tiga sub bab. Sub beb pertama membahas tentang Model yang di pakai pada Sukuk Istishna'-Ijarah untuk pembiayaan pembangunan pasca bencana di Indonesia. Di sub bab kedua membahas tentang simulasi pembiayaan atau perhitungan Sukuk Istishna'-ijarah pada Pembangunan pasca bencana di Jogja-Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bengkulu. Sub bab ketiga membahas tentang potensi Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai pembiayaan pembangunan pasca bencana alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Model Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

1. Model Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

Menurut direktorat pembiayaan(2007:29)Sukuk Istishna'Ijarah telah beberapa kali dipraktekan untuk pembiayaan proyek seperti yang dijelaskan oleh Ahsan, pakar sukuk dari salah satu global investment bank terkemuka bahwa struktur istishna'-ijarah bisa dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah yang bersifat pelayanan kepada masyarakat atau publik terutama untuk menyediakan infrastruktur publik seperti rumah sakit,bandara dan pusat bisnis. Pada infrastruktur atau fasilitas sosial yang sebagian besar merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya demi kepentingan publik,dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Skripsi ini mengusulkan sebuah model yang disebut Sukuk Istishna'kombinasi Ijarah untuk memanfaatkan dana sebagai pendanaan pemulihan bencana alam.

Model ini memberikan mekanisme detail dan formula sukuk istishna'-ijarah. Ada dua bagian pihak yang terkait dalam pembiayaan proyek ini yakni pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek serta pihak terkait dengan penerbitan SBSN Istishna'-Ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

Model Sukuk Istishna'-Ijarah Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana

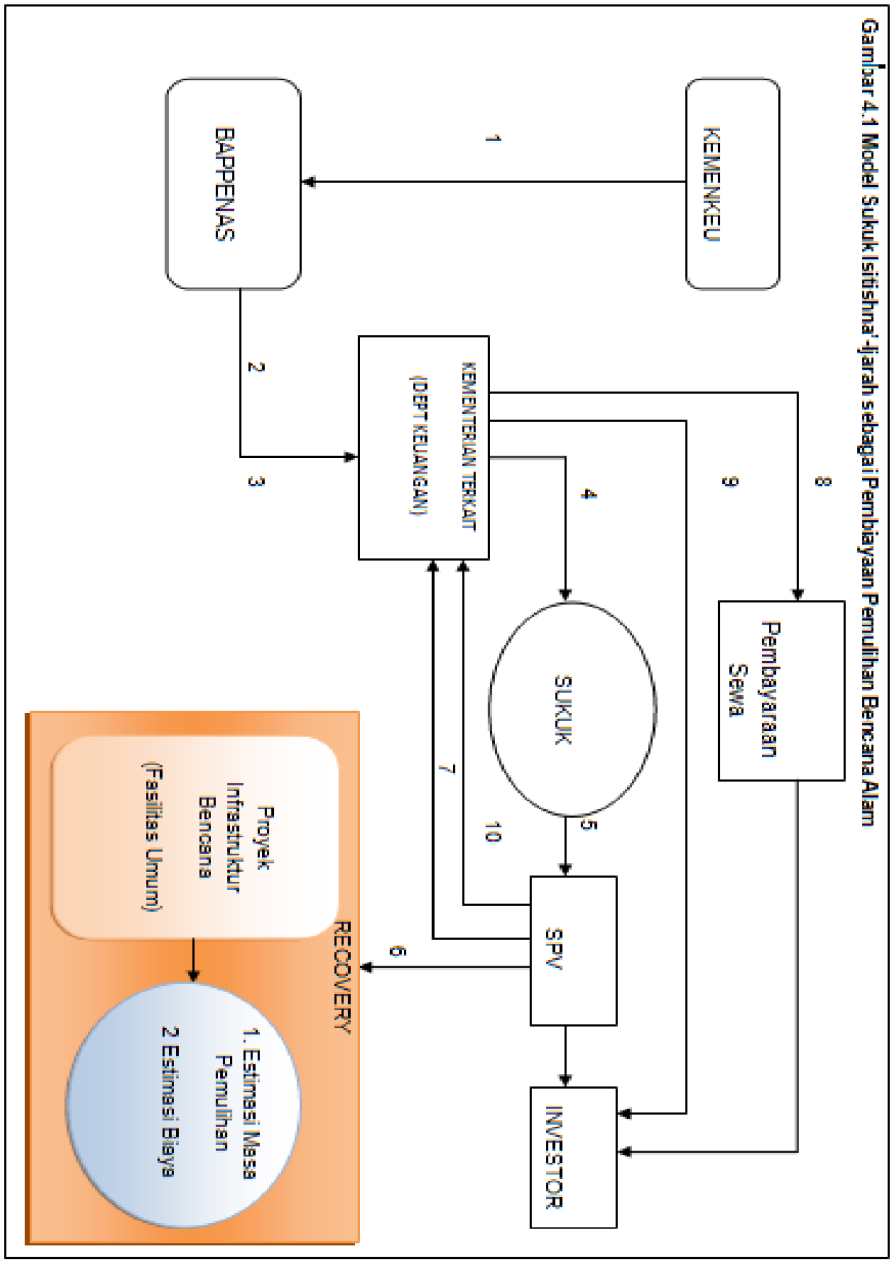

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Model Sukuk Istishna'-ijarah sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengajuan usulan proyek/kegiatan yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja & studi kelayakan.
2. Penilaian kelayakan dan kesiapan proyek atau kegiatan, juga penyusunan pada penyampaian daftar prioritas atau kegiatan.
3. Pembuatan anggaran untuk pembiayaan.
4. Perjanjian istishna' dan undertaking antara (Departemen Keuangan) dengan SPV untuk membeli aset istishna' pada saat berakhirnya periode sukuk.
5. Penerbitan SBSN oleh SPV kepada para investor.
6. Hasil Penerbitan SBSN digunakan untuk pembiayan proyek melalui mekanisme investasi.
7. Perjanjian penyewaan aset dari investorkepada Pemerintah. Investor diwakili oleh SPV.
8. Pembayaran sewa secara periodik dari pemerintah kepada investor.
9. Pada jatuh tempo (sukuk redemption), pemerintah membeli aset istishna' senilai SBSN yang diterbitkan.
10. Aset Istishna' ditransfer oleh SPV kepada Pemerintah untuk selanjutnya statusnya berubah menjadi Barang Milik Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukuk Istishna'-Ijarah pada saat melakukan pembangunan yang letak istishna' adalah pembelian barang didepan dan pembayaran atau pelunasan margin atau keuntungan dibelakang. Agar pemerintah berhak untuk mengelolah maka pemerintah melakukan sewa sambil menyicil atau melunasi margin atau keuntungan.

Adapun imbal hasil (kupon) sukuk yang dibayarkan pemerintah akan dikembalikan untuk negara dan akan diberikan untuk korban bencana dalam bentuk infrastruktur publik seperti rumah sakit,sekolah, dsb. Kemenkeu,BNPB, dan kementerian pelaksana proyek pembangunan infrastruktur, diawasi oleh lembaga terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemerintah melalui kementerian keuangan mematok 8% sebagai nilai kupon.[1]Tetapi pada perhitungan untuk simulasi menggunakan 7,9% atau prosentase setara yang mendekati.Maka akumulasi perhitungan untuk sukuk istishna'-ijarah, dengan asumsi kupon dan ujrah tetap, maka perhitungan pembiayaan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\textbf{Istishna}' = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{M}$$

$$\textbf{Ijarah} = \textbf{I x u x t}$$

[1]Dwi Aditya Putra, "Kemenkeu tawarkan sukuk negara ritel seri SR-011, Imbal hasil capai 8,05 persen", diakses dari https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-tawarkan-sukuk-negara-ritelseri-sr-011-imbal-hasil-capai-805-persen, pada oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana :

I	= Investasi
M	= Margin atau keuntungan imbal hasil
T	= Tenor atau jangka waktu
U	= Ujrah

B. Simulasi Pembiayaan Sukuk Istishna' – Ijarah pada Pemulihan Bencana Alam

1. Gempa yang terjadi Jogja dan Jawa Tengah

Gempa Jogja dan Jawa Tengah pada Mei 2006 menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Total keseluruhan dari kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi yang ditaksir sebesar Rp 29,1 triliun atau setara dengan US$3,1 milyar. Pada nilai total keseluruhan kerusakan yang terjadi di ditaksir sebesar Rp 22,75 triliun atau prosentase 78% dari nilai total keseluruhan juga total keseluruhan kerugian ekonomi sebesar Rp 6,40 triliun atau prosentase 22%.

Nilai kerusakan mewakili besaran pembiayaan. Terhitung dari jumlah sumbangan pada para korban yang diperlukan dalam rekontruksi. Nilai kerugian tersebut juga membatasi pendapatan pribadi dan aktifitas ekonomi yang bakal ditimbulkan pada bulan-bulan berikutnya yang disebabkan oleh bencana gempa bumi. Pada tabel 4.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Ikhtisar Kerusakan dan kerugian gempa Jogja – Jateng

(dalam Milyar Rupiah)

Jenis Kerugian	Efek Bencana		Total	Kepemilikan	
	Kerusakan	Kerugian		Swasta	Pemerintah
Perumahan	13.915	1.382	15.296	15.296	0
Infrastruktur	397	154	551	76	476
Transportasi dan Penghubungan	90	0	90	0	90
Energi	225	150	375	0	375
Air dan Kebersihan	82	4	86	76	10
Sektor Sosial	3.906	77	3.982	2.112	1.870
Pendidikan	1.683	56	1.739	584	1.154
Kesehatandan Perlindungan Sosial	1.569	21	1.590	1.030	560
Budaya dan Agama	654	0	654	498	156
Sektor Produktif	4.348	4.676	9.025	8.854	170
Pertanian	66	640	705	700	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan	184	120	303	138	165
Industri	4.063	3899	7962	7.962	0
Pariwisata	36	18	54	54	0
Lintas Sektor	185	110	295	48	247
Pemerintah	137	0	137	0	137
Perbankan dan Keuangan	48	0	48	48	0
Lingkungan	0	110	110	0	110
Jumlah Total	22.751	6.398	29.149	26.386	2.763
Jumlah Total, Juta US$	2.446	688	3.134	2.837	297

Sumber: Penilaian Kerusakan dan kerugian Bencana alam di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Juli 2016.

Angka kerusakan yang terjadi pada infra struktur pemerintah mencapai Rp 476 Milyar. Sementara sector produktif milik pemerintah maupun swasta mengalami kerusakan hingga mencapai Rp 9 Triliun. Hal ini tentu menjadi biaya yang cukup berat bagi pemerintah apabila ditanggung sendiri. Maka alterternative menggunakan Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ikhtisar kerusakan dan kerugian akibat gempa di atas, ditunjukkan bahwa total kerusakan dan kerugian milik pemerintah mencapai Rp 2,763 Triliun. Merujuk pada potensi investasi yang di berikan investor, nilai kerusakan dan kerugian milik pemerintah tersebut senilai 3,5% dari potensi investasi yang diberikan. Apabila nilai tersebut terpenuhi, dengan ekspetasi kupon hasil sukuk sebesar 7,9% per tahun dengan margin serta tenor sewaselama 5 tahun, maka diperoleh dana sebagai berikut:

$$\text{Ijarah} = \text{Rp}7.000.000.000 \text{ x } 7{,}9\% \text{ x } 5$$

$$= \text{Rp}2.765.000.000$$

$$\text{Istishna}' = \text{Investasi} + (7{,}9\% \text{ x t x I})$$

$$\text{Istishna}' = \text{Rp}500.000.000 + (\ 7{,}9\% \ \text{ x } 5 \text{ x Rp}500.000.000)$$

$$= \text{Rp}500.000.000 + \text{Rp}197.500.000$$

$$= \text{Rp}697.500.000\text{,-/ 5 tahun}$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa, apabila sukuk Istishna'Ijarah terhimpun sebesar Rp 2,763 Triliun, maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Hasil sewa dan pembangian margin dalam tenor 5 tahun mampu mengcover pemulihan bencana alam yang ada di daerah Jogja dan Jawa Tengah dengan margin yang ringan dalam waktu 5 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat dan Bengkulu

Gempa Sumatera barat dan Bengkulu pada September 2007 menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Nilai keseluruhan total kerugian dan kerusakan yang disebab kan oleh gempa bumi yang ditaksir mrndekati sebesar Rp 2 triliun. Jumlah total kerusakan yang terjadi di sumatera barat diperkirakan mencapai Rp 1 Triliun dan di Bengkulu mencapai Rp900 juta dan jumlah total kerugian ekonomi mencapai Rp 5,7 Milyar. Nilai dari kerusakan yang mewakili anggaran pembiayaan, terhitung dari bantuan dari korban, lebih diperlukan pada rekonstruksi dimana nilai kerugian yang menyebabkan pembatasan aktifitas ekonomi juga pendapat individu serta keluarga yang disabkan akan muncul pada bulan-bulan selanjutnya yang disebabkan oleh gempa bumi di lihat pada tabel 4.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian Gempa Bengkulu dan Sumatera Barat

No	Sektor /Subsektor	Nilai Kerusakan		Nilai Kerugian		Total
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Bengkulu	Provinsi Sumatera Barat	
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
A	Perumahan	449.448.75	391,845.25	-	-	841.294.00
B	Infrastruktur	179.625	51.690.60	-	-	231.315.37
	1. Transportasi 2. Energi 3.Posdan Telekomunikasi 4. Infrastruktur Sumber Daya Air	55.930 3.670 - 120.025	39.014.69 2.047.91 - 10.628.00	- - - -	- - - -	94.944.81 5.717.55 - 130.653.00
C	Sosial	85.899	325.997.45	80.00	2.031.00	414.007.45
	1. Kesehatan 2.Pendidikan 3.Agama 4.Lembaga Sosial	11.100 11.239 62.085 1.475	4.495.00 222.128.00 81.177.00 18.197.45	- 80.00 - -	100.00 1.931.00 - -	15.695.00 235.378.00 143.262.00 19.672.45
D	Ekonomi	26.145	83.800.00	2.202.00	450.00	112.596.75
	1.Perdangangan 2.Perikanan	17.400	82.000.00 -	2.202.00 -	450.00	102.052.00 8.744.75
	3. Perindustrian 4. Perbankan	8.745 - -	- 1.800.00	- -	- - -	- 1.800.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E	Lintas Sektor	262.397	26.000.00	960.00	-	289.356.80
Total		1.003.514	879.333.30	3.242.00	2.481.00	188.570.36
Total Nilai Kerusakan dan Kerugian		1.882.847		5.723		1.888.570
Grand Total		1.888.570				

Tabel 4.3

Total Jumlah Kerusakan dan kerugian dari Kepemilikan Pemerintah Dan Swasta

No.	Sektor /Subsektor	Kepemilikan	
		Pemerintah	Swasta
		(Rp Juta)	(Rp Juta)
A	Perumahan	-	841.294.00
B	Infrastruktur	196.300.36	35.015.00
	1. Transportasi	94.944.81	-
	2. Energi	5.717.55	-
	3. Pos dan Telekomunikasi	-	-
	4. Infrastruktur Sumber Daya Air	95.638.00	35.015.00
C	Sosial	351.491.32	62.516.13
	1. Kesehatan	15.695.00	-
	2.Pendidikan	235.378.00	-
	3.Agama	94.123.13	49.138.87
	4. Lembaga Sosial	6.295.18	13.377.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D	Ekonomi	102.052.00	10.544.75
	1.Perdangangan 2. Perikanan 3. Perindustrian 4. Perbankan	102.052.00 - - -	- 8.744.75 - 1.800.00
E	Lintas Sektor	289.356.80	-
Total		939.200.47	949.369.88
Total Nilai Kerusakan dan kerugian		939.200	949.370
Grand Total		1.888.570	

Angka kerusakan yang terjadi pada infrastruktur pemerintah mencapai Rp 2 Milyar. Sementara sector produktif baik milik pemerintah mampu swasta mengalami kerusakan hingga mencapai Rp 1,1 Milyar. Hal ini tentu menjadi biaya yang cukup berat bagi pemerintah apabila ditanggung jawab. Maka alternativenya pada Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai solusi untuk pembiayaan pemulihan bencana alam yang harus dipertimbangkan.

Pada ikhtisar kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa total kerusakan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan milik pemerintah mencapai Rp 1,8 Milyar. Merujuk pada potensi investasi pada sukuk yang diberikan oleh investor.Apabila nilai tersebut terpenuhi, dengan ekspetasi kupon hasil sukuk sebesar 7,9% per tahun dengan margin serta tenor sewa selama 5 tahun, maka diperoleh dana sebagai berikut:

$Ijarah \quad = \; Rp2.000.000.000 \; x \; 7{,}9\% \; x \; 5$

$= \; \text{Rp}790.000.000$,-

$Isthisna' \; = Rp150.000.000 + (7{,}9\% \;\; x \; 5 \; xRp150.000.000)$

$= RpRp150.000.000 + RpRp59.250.000$

$= RpRp209.250.000, -/5\text{tahun}$

Hasil di atas menunjukkan apabila sukuk Istishna'-Ijarah terhimpun sebesar Rp 1 Triliun, maka nilai tersebut bisa mengcover keseluruhan pembiayaan kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Hasil sewa dan pembangian margin dalam tenor 5 tahun mampu mengcover pemulihan bencana alam yang ada di daerah Sumatera dan Bengkulu dengan margin yang ringan dalam waktu 5 tahun. nilai yang cukup untuk kemudian dimanfaatkan sebagai pembangunan infrastruktur public seperti digunkaan untuk pembangunan masjid,sekolah,maupun pemodalan kepada sektor produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Potensi Sukuk Istishna'-Ijarah sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

Berdasarkan perhitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentang anggaran tanggap darurat bencana yang mana idealnya sebesar Rp 15 Triliun dalam setahun dimana yang kita tahu bahwa negara Indonesia rawan terhadap bencana. Pada tahun 2018 anggaran yang disediakan sekitar hanyalah Rp6,3 trilun. Dengan anggaran tersebut membebani BNPB dalam hal melaksanakan beragam macam aktifitas tanggap darurat, rehabilitas, daan pemulihan pasca bencana. Sedikitnya anggaran yang menyebabkan ketersediaan dalam menghadapi bencana.

Pada saat ini, pemerintah hanya berkonsentrasi dalam memitigasi upaya fisik seperti memberikan makanan atau merelokasi infrastruktur publik. Terlebih lagi ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur publik baru terjadi, masalah lain seperti kepemilikan tanah yang di usulkan untuk lokasi infrastruktur ditolak karena kompenasasi yang tidak pantas.

Masalah lain juga terjadi yaitu masalah sosial ekonomi seperti usaha kecil menengah yang terganggu pasca bencana, atau banyaknya pengangguran baru atau proses pendidikan yang menganggu bagi para korban yang masih sekolah. Maka dari itu menjadi salah satu alasan program komprehensif yang seperti ini belum dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasa anggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membiayai semua program. Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan.

Potensi sukuk di Indonesia sangat besar. Menurut data dari direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko penjualan sukuk negara ritel sebesar Rp 21 Triliun[2]. Dana yang terjusl tersebut menjadi potensi yang sangat besar yang harus dimaksimalkan dengan asumsi kupon sebesar 7,9%. Dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan dana hibah BNPB[3] untuk pemulihan bencana.

Adapun imbalan hasil (kupon) sukuk yang dibiayai oleh pemerintah akan di kembalikan kepada korban bencana dalam bentuk:

1) Sarana ibadah (masjid,madrasah,dsb)
2) Infrastruktur sosial (irigasi,sumur,dsb)
3) Balai kesehatan
4) Sarana Pendidikan (sekolah,dsb)

Prospek Sukuk Istishna-Ijarah membantu pembiayaan pada daerah terkena bencana dalam hal infrastruktur publik. Pada saat terjadi bencana ada kerusakan dan kerugian yang terjadi didaerah jogja-Jawa tengah dan Bengkulu – Sumbar dalam hal ini pemerintah berusaha melakukan pembangunan kembali dengan melihat data laporan yang terdapat di BAPPENAS yaitu ada kepemilikan Swasta dan Pemerintah.

---

[2] Djppr.kemenkeu.go.id Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR 0-11 pada Minggu 27 oktober 2019 20.00 WIB.

[3] Berdasarkan kalkukasi BNPB, dana tanggap darurat bencana yang ideal adalah Rp 15 triliun per tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembiayaan Sukuk Istishna-ijarah ini yang akan di biayain pemerintah hanyalah kepemilikan Pemerintah. Dengan pembangunan kembali menjadi prospek pada pemerintah salah satunya budaya contoh menjadi daya tarik wisata untuk berkunjung ke tempat tersebut juga mengembangkan usaha kecil warga masyarakat menjadi berkembang.

Dengan pembiayaan sukuk istishna-ijarah dapat memberikan manfaat hasilnya dimana dengan kolaborasi ini bermanfaat tidak hanya bagi para pemangku kepentingan dari sistem keuangan Islam juga masyarakat umumnya, dengan banyaknya investor yang membeli sukuk negara pemerintah akan mendapatkan lebih banyak sumber daya keuangan untuk mendorong pengembangan sektor sukuk yang lebih cepat.

Bagi pemerintah, hal ini yang menunjukkan kolaborasi yang efektif dan efisien, dimana aset sukuk dapat berfungsi sebagai aset berbiaya rendah akan menghemat banyak sumber daya keuangan pemerintah sambil menjaga tingkat manfaat yang sama untuk publik. Dengan adanya bantuan pembiayaan sukuk untuk bencana alam sangat bermanfaat bagi masyarakat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pasca bencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sukuk adalah salah satu produk investasi yang berpotensi yang mana perlu dioptimalkan untuk dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sosial (manfaat publik) untuk pembangunan kembali pasca bencana alam. Pada model yang telah dibuat memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan dana pembiayaan dari sukuk, sehingga muncul instrumen Sukuk istishna'-ijarah sebagai investasi yang bisa membantu pembiayaan pembangunan pasca bencana alam.
2. Hasil simulasi penerapan sukuk istishna'-ijarah pada pembiayaan pemulihan gempa jogja-jawa tengah dan Sumatera barat-Bengkulu menunjukkan bahwa, apabila Sukuk Istishna'-Ijarah terhimpunan sebesar Rp 4 Triliun, total dari 4 daerah maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Tak hanya itu hasil dari margin dan penyewa yang dihitung dalam tenor 5 tahun yaitu pada Gempa Jogja-Jawa Tengah untuk Istisna' Rp 697.500.000 dan pembayaran sewa senilai Rp2.765.000.000. pada Sumatera BaratBengkulu dengan tenor 5 tahun yaitu untuk pembayaran sewa senilai Rp790.000.000 dan pembayaran margin dalam akad jual beli senilai Rp209.250.000. Hasil dari investasi tersebut bisa digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembangunan sekolah,jalan,dan kesehatan juga sector produktif lainnya.

3. Sukuk Istishna'-Ijarah sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan kembali bencana alam yang tepat. Dana sukuk yang terkumpul melalui Sukuk Istishna'-Ijarah ini bisa bermanfaat. Sukuk digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Adapun imbal hasil (kupon) sukuk yang dibayar pemerintah akan di kembalikan dalam bentuk: a) Sarana ibadah (masjid,madrasah, dan sebagainya); b) Infrastruktur sosial (irigasi,sumur,dan sebagainya); c)Balai Kesehatan; d) Sarana Pendidikan (sekolah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di atas,yang kiranya penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan atas kondisi yang lebih baik lagi. Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian.

1. Pemerintah dapat mengoptimalkan kapasitas sukuk sebagai jalan keluar untuk pembiayaan infrastruktur atau pembangunan nasional di Indonesia dan mulai mengkecilkan keterikatan pada hutang luar negeri dari halnya pembiayaan pembangunan di Indoensia.
2. Pemerintah diusulkan untuk menyederhanakan jalan dari beriinvestasi pada sukuk. atas dimudahkan jalan untuk para investor yang dari luar negeri dan dalam negeri untuk berinvestasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sukuk maka tentu sebagai angka yang akan bertambah untuk Indonesia yang bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi.

3. Edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk secara berkelanjutan kepada masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan persepsi tentang pentingnya berinvestasi pada sukuk, mengingat instrumen sosial yang familiar dimasyarakat masih kurang paham. Dimana sukuk memiliki potensi besar terhadap pembangunan sosial di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Arbano, Reva, "Penerbitan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Negara", Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009.

BAPPENAS, Pemerintah Provinsi dan Daerah, D.I. Yogyakarta,Pemerintah Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra International, "Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah",publikasi, Juli 2016.

BAPPENAS, Pascabencna Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat 12 September 2007, "Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Bengkulu dan Sumatera Barat", publikasi oktober 2010.

Diyanti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN", Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta :Majelis Ulama Indonesia. 2000.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Surat Hutang Berharga. Jakarta :Majelis Ulama Indonesia. 2002.

Eriyanto, "Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya". Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015.

Emily dan Marilyn. *"Content Analysis: A flexible Methodology"*. Library Trends, Vol. 55, No. 1, summer 2006.

Eri,Hariyanto."*Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber PembiayaanInfrastruktur*".dalam http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807,diakses 27 september 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatah, Dede Abdul. " *Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan"* . *Al-Adalah*. Vol. X. No. 1 Januari, 2011.

Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. *"Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia"*. Tesis:2019.

Fitrianto, Achmad Room. *"Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Consepts of Infrastructure Approach in Provinding Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Valcano"* Presented on Annual International Coference on Islamic Studies (AICIS XII). Proceeding Coference. 2010.

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank, *"Lessons from the Efforts to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia"*, *Technical Note*, 2010.

-------, *"Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration".* publication, Oktober,2011.

Helmi, Achmad. "Komparasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dengan dana obligasi konvensional dan obligasi syariah/sukuk(studi kasus pembangunan jalan tol trans sumatera)", Skripsi-UIN Sunan Kalijaga,2015.

Huda ,Nurul, dan Nasution, Mustafa Endwin. *"Investasi pada Pasar Modal Syariah"*. Cetakan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

https://Djppr.kemenkeu.go.id

Immy dan Christine."*Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications"*, Pen. Cahya Wiratama".Yogyakarta: Bentang, 2008.

Juliansyah, Noor. "*Metodologi Penelitian"*.Jakarta: Pranada Media Group, 2011.

Krisdiantoro, *"Kerugian akibat gempa lombok Rp8,8 Triliun, 125 ribu lebih rumah rusak"*, dalam: http://jabar.tribunnews.com/2018/08/27/kerugian-akibat-gempa-lombok-rp-88-triliun-125-ribu-lebih-rumah-rusak di akses pada 21 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khairunnisa, Novia. "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia), Skripsi-UIN Aceh,2018.

Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 24 tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pebrianto, Fajar. "*BNPB: Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Capai Rp 8,6 T"*, tempo.co, 10 September 2018 diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1125193/bnpb-kebutuhan-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-capai-rp-86-t pada 14 Juli 2019.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Putra, Dwi Aditya. "*Kemenkeu tawarkan sukuk negara ritel seri SR-011, Imbal hasil capai 8,05 persen"*, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-tawarkan-sukuk-negara-ritel-seri-sr-011-imbal-hasil-capai-805-persen, pada oktober 2019.

Ridhoi, M. Ahsan. "Komisi VIII: BNPB Punya Dana Rp 6,5 T untuk Penanggulangan Bencana", dalam https://tirto.id/c396 diakses pada 30 Mei 2019.

Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group,2013.

Sudarsono, Heri. *"Peran Obligasi Syariah (sukuk) bagi pembangunan nasional"*. *Aplikasi Bisnis D3 FE UII*. Vol. 7. No.12. Januari, 2008.

Suminto. Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. Jakarta : Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,2015.

Tenri, Andi. "Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara", Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar,2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempo.co, *"Total kerugian Aceh dan Sumut sekitar Rp 42,7 Triliun"*, dalam: https://nasional.tempo.co/read/55201/total-kerugian-aceh-dan-sumut-sekitar-rp-427-triliun diakses pada 20 maret 2019.

Tim CNN Indonesia, "*BNPB: Kerugian akibat gempa palu capai Rp18,4 Triliun"*, dalam:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181028193229-20-342094/bnpb-kerugian-akibat-gempa-palu-capai-rp184-triliun, di akses pada 21 maret 2019.

Umam. *"Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah"*.Bandung: CV Pustaka Setia,2013.

Wikipedia,"Cincin Api Pasifik", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/cincin_api_pasifik, diakses Pada 19 maret 2019.

Wahid, Nazaruddin Abdul. *"Sukuk; Memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah"*. Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2010.

Yusuf, Muri. *"Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan"*. Jakarta: Kencana, 2017.

Yuliana, Indah. *"Investasi Produk Keuangan Syariah"*. UIN Maliki Press , 2010.

Yasni, M Gunawan. "*Pilih Mudharabah atau Ijarah"*, Modal edisi: 23, 2004.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Revka Putra Media, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id